

**ANALISIS MANAJEMEN LIKUIDITAS DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BAITUT TAMWIL
MUHAMMADIYAH (BTM) KOTA TEGAL**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Ilmu Ekonomi Islam (S.E)



Oleh:

EVI VANIA ZURaida

1405026109

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO EMARANGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan telp.(024) 7608454 Semarang 5018
Website : Febi.walisongo.ac.id – Email : Febiwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Evi Vania Zuraida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : Evi Vania Zuraida
NomorInduk : 1405026109
Judul : Analisis Manajemen Likuiditas Dalam Perspektif
Ekonomi Islam Pada Baitut Tamwil
Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudari tersebut dapat segera di munaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 17 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M.
NIP. 196909082000031001

Nurudin, SE., MM.
NIP. 199005232015031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO EMARANGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan telp.(024) 7608454 Semarang 5018
Website : Febi.walisongo.ac.id – Email : Febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Evi Vania Zuraida
NIM : 1405026109
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Likuiditas Dalam Perspektif
Ekonomi Islam Pada Baitut Tamwil
Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal.

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal: 10 Januari 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana
(Strata Satu/S1) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 10 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M.
NIP. 196909082000031001

Penguji I

Penguji II

H. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

Drs. H. Imam Yahya, M.Ag.
NIP. 197004101995031001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Wahab Zaenuri, M.M.
NIP. 196909082000031001

Nurudin, SE., MM.
NIP. 199005232015031004

MOTTO

... يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Mujadalah: 11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan kami persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Abdul Choliq dan Ibu Sri Rahayu, yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, pengertian, perhatiannya, dan mencurahkan doa yang tiada hentinya dipanjatkan untuk ku sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
2. Tiga kakakku tercinta, M. Mansur Syariffudin, Silvia Altiara dan Nur Vita Dinana yang telah menjadi penyemangat dalam hari-hariku.
3. Sahabat Seperjuangan Kelas EID 2014 yang selama ini telah bersama dalam suasana suka maupun duka untuk meraih impian.
4. Tim PPL di Balai Kota Tegal diantaranya Ulya, Intan, Uca, Inne, Icha, Isna, yang senantiasa melaksanakan perjuangan. Semoga senantiasa tetap terjaga tali persaudaraan.
5. Tim KKN MIT V posko 69 Desa Nogosaren, Kec. Getasan, Kab. Semarang yang telah mengajarkanku arti dari sebuah pertemanan, persahabatan, hingga menjadi sebuah persaudaraan dalam satu keluarga besar yang saling mendukung dan mendo'akan disetiap langkah perjuangan hidup ini.
6. Untuk keluarga besar Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) komisariat Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi serta dukungannya untuk Saya.
7. Dan Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikian persembahan ini saya sampaikan, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan disetiap langkah yang kita lakukan. Aamiin

Penulis

EVI VANIA ZURaida
NIM.1405026109

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Desember 2018

Deklarator

EVI VANIA ZURAIDA
NIM.1405026109

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB– LATIN

Transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es(titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zal	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(titik bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (titik bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(titik bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (titik bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik Diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* Ditulis Rangkap

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ditulis *la'allakum*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir kata

a) Bila dimatikan, ditulis h:

هَسَّحَ ditulis *Hamzah*

b) Bila di hidupkan karena berangkaian dengan kata lain:

نِيَّحَ اللَّهُ ditulis *ni'matullah*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Analisis Manajemen Likuiditas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal**”. Di dalam suatu lembaga keuangan diperlukan adanya manajemen likuiditas. Pentingnya sebuah lembaga keuangan mengelola likuiditas secara baik terutama ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana.

Penulis menemukan permasalahan yang menjadi dasar dimulainya penelitian ini dengan dua rumusan masalah, diantaranya: Pertama, Bagaimana manajemen likuiditas yang diterapkan pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal dilihat dalam Perspektif Ekonomi Islam? Kedua, Apa saja kendala yang dihadapi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal dalam mengelola likuiditas?

Ada dua tujuan penelitian yang akan digali, diantaranya adalah untuk mengetahui manajemen likuiditas pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola likuiditas.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan data dan informasi yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak BTM Kota Tegal untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berhubungan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa Manajemen likuiditas yang diterapkan pada BTM Kota Tegal menggunakan pengaturan *cash ratio* dengan besaran 11%-15% dari pihak ketiga. Secara umum pengelolaan likuiditas berjalan dengan baik. Namun pengelolaan keuangan pada tahun 2014 dan 2015 bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Sebab secara tidak langsung pengelolaan keuangan dengan pembiayaan melebihi nilai tabungan dan deposito memiliki tingkat risiko yang cukup besar yang dapat merugikan pihak lain. Sedangkan pada tahun 2016-2018 dana yang tertampung pada BTM Kota Tegal lebih besar daripada pembiayaan. Hal ini sangat bermasalah bagi BTM sendiri, karena dana tersebut tidak terputarkan, sedangkan dana pihak ketiga harus berjalan sebagai mana mestinya.

Kendala yang dihadapi oleh BTM Kota Tegal antara lain: penarikan besar-besaran pada bulan ramadhan saat menjelang Idul Fitri dan pada saat tahun ajaran baru, serta pengambilan dana yang tidak terduga atau sewaktu-waktu dalam jumlah besar yang menyebabkan BTM mengalami kekurangan dana sehingga mengharuskan untuk meminta bantuan kepada BTM pusat Jawa Tengah.

Kata Kunci: Manajemen Likuiditas, Ekonomi Islam, BTM

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti dan menegakkan syariat-Nya *aamin yaa rabbal'aalamiin*.

Alhamdulillah atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berkenan membantu terselesaikannya skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Furqon Lc. MA selaku Kajar Ekonomi Islam.
4. Bapak M. Nadhir M.Ag selaku Sekjur Ekonomi Islam.
5. Bapak Drs. H. Wahab Zaenuri, MM selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Nuruddin, SE. MM selaku Pembimbing II dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Kedua orang tua Saya Bapak Abdul Choliq dan Ibu Sri Rahayu yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku. Dan selalu memberikan

kasih sayang, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materil.

8. Teman-teman seperjuangan, yang setia melangkah bersama dalam suka maupun duka.
9. Sahabat-sahabat semua dari jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis percaya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh akan kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Semarang, 17 Desember 2018

EVI VANIA ZURAI DA
NIM.1405026109

	2. Karakteristik Ekonomi Islam	30
	3. Prinsip Ekonomi Islam	34
	E. Manajemen Likuiditas dalam Perspektif Ekonomi Islam	38
BAB III	GAMBARAN UMUM TENTANG BAITUT TAMWIL (BTM) KOTA TEGAL	
	A. Sejarah Pendirian Baitut Tamwil Kota Tegal.....	41
	B. Pengendalian Risiko	43
	C. Organisasi dan Manajemen	44
	D. Kebijakan dan Ketentuan Penyaluran Dana.....	49
	E. Pemantauan dan Pembinaan	54
BAB IV	ANALISIS MANAJEMEN LIKUIDITAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) KOTA TEGAL	
	A. Manajemen Likuiditas BTM dalam Perspektif Ekonomi Islam	57
	B. Kendala Likuiditas Pada BTM Kota Tegal	66
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Likuiditas merupakan kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek baik berupa kewajiban atau hutang yang harus dibayar melalui harta lancar. Rendahnya angka likuiditas pada lembaga keuangan mikro syariah berdampak pada ketidakmampuan lembaga untuk melunasi kewajiban lancar, diantaranya: tabungan *wadi'ah*, bagi hasil yang belum diambil, dan deposito yang telah jatuh tempo. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mengancam kredibilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Namun sebaliknya, likuiditas yang tinggi karena persediaan kas cukup banyak akibat kelebihan dana yang tidak dikelola untuk usaha menyebabkan perolehan laba lembaga keuangan menjadi rendah akibat dana yang tertampung tidak dioptimalkan untuk pembiayaan usaha-usaha mikro.¹

Agar likuiditas berjalan dengan baik, sirkulasi *cash in* dan *cash out* pun harus diatur sesuai dengan mekanisme pengelolaan yang tepat, sehingga sumber dana yang dimiliki lembaga dapat memenuhi seluruh kebutuhan (*cash flow*) kewajiban yang akan jatuh tempo. Kondisi tersebut akan memberikan efek positif berupa kepuasan bagi anggota.

Anggota dalam sebuah lembaga keuangan diibaratkan sebagai seorang raja yang harus dilayani semua keinginan dan kebutuhannya dalam batas-batas etika dan moral yang tidak merendahkan lembaga tersebut.² Sebab eksistensi lembaga keuangan khususnya mikro syariah sangat dipengaruhi oleh keikutsertaan anggota di dalam memenuhi produk-produk yang ditawarkan. Kondisi inilah yang akhirnya melatarbelakangi lembaga mikro syariah menciptakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat seperti produk simpanan, produk pembiayaan, produk usaha, produk jasa, dan lainnya.

¹ M. Amin Aziz, *Pedoman Penilaian Kesehatan BTM Baitul Mal wat Tamwil*, (Jakarta: Pinbukpress, 2005), hlm.28-29.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.10

Pada dasarnya setiap lembaga keuangan khususnya mikro syariah dituntut untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek.³ Lembaga tersebut harus selalu siap jika suatu saat akan ada anggota yang melakukan penarikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka sudah seharusnya lembaga keuangan menyiapkan manajemen likuiditas⁴ yang baik dan profesional.⁵

Likuiditas secara umum memiliki beberapa fungsi, diantaranya: menjalankan transaksi bisnis sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, serta memuaskan permintaan anggota yang akan melakukan pinjaman atau pembiayaan modal usaha. Pemenuhan likuiditas pada lembaga keuangan mikro syariah tentu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Apabila fungsi tersebut diabaikan atau tidak terpenuhi maka akan menjadi masalah cukup serius yang menyebabkan terjadinya risiko likuiditas.

Risiko likuiditas muncul akibat lembaga keuangan mikro syariah kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Suatu lembaga meskipun memiliki aset yang cukup bernilai akan tetapi tidak mampu memenuhi atau membayar kewajibannya, maka aset tersebut dianggap tidak likuid. Sebab kebutuhan untuk menyelesaikan risiko likuiditas adalah adanya suntikan dana agar kembali stabil.

Besar kecilnya risiko likuiditas pada lembaga keuangan mikro syariah secara umum ditentukan dari kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. Untuk menghindari terjadinya risiko ketidakstabilan operasional pada sebuah lembaga keuangan maka kebijakan manajemen likuiditas harus diterapkan yaitu dengan menjaga asset jangka pendek seperti kas dan pemeliharaan *earning asset*⁶ yang dapat dijual dengan mudah.

³ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.183.

⁴ Manajemen likuiditas merupakan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan.

⁵ Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm.197.

⁶ Aset Produktif/*earning asset* merupakan penyediaan dana atau penanaman dana dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, dan penanaman lain untuk memperoleh penghasilan. Ralona M, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Niaga Swadaya, 2006), hlm.5.

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KLKMS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal merupakan lembaga usaha milik Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Tegal Timur I dan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tegal. Lembaga tersebut didirikan pada tahun 2008. Anggota lembaga tersebut sebagian berasal dari kader-kader Muhammadiyah dan masyarakat yang berdomisili di Kota Tegal.

Dalam proses operasionalnya, KLKMS BTM Kota Tegal pasti pernah mengalami kelebihan atau kekurangan dana. Kelebihan dana dioptimalkan untuk memperbesar nilai pembiayaan usaha guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sementara kekurangan likuiditas yang disebabkan adanya kegiatan pembiayaan, BTM melakukan upaya *funding* (penghimpunan dana) melalui sumber lain untuk menutupi kekurangan likuiditas tersebut sehingga kegiatan operasional BTM dapat berjalan dengan baik.

Setiap anggota yang menitipkan dana tentu berharap dapat melakukan penarikan setiap saat. Oleh karena itu, BTM Kota Tegal hendaknya dapat mengatur likuiditas dengan baik sehingga kepercayaan dari anggota BTM dapat terjaga dan kewajiban BTM pada anggota dapat ditunaikan. Maka diperlukan manajemen likuiditas yang baik sehingga operasional dapat berjalan dengan baik.

Manajemen likuiditas yang baik akan memberikan dampak positif khususnya kepercayaan anggota. Dengan terpenuhinya likuiditas sebuah lembaga, maka anggota BTM akan merasa terlindungi karena uang yang dititipkan dapat diambil setiap saat. Hal ini juga akan memberikan efek positif bagi lembaga yaitu untuk menjaga kontinuitas lembaga keuangan. Dengan terpenuhinya kewajiban pada anggota BTM maka tingkat kepercayaan (kredibilitas) dari anggota BTM akan terjaga dan keberlangsungan lembaga keuangan akan terhindar dari risiko likuiditas yang paling besar yaitu kolaps.

Pentingnya manajemen likuiditas pada suatu lembaga keuangan, maka penting pula untuk mengetahui atau meneliti lebih jauh manajemen likuiditas yang baik serta meneliti hambatan-hambatan yang seringkali terjadi perihal manajemen likuiditas. Sebab likuiditas memiliki peran penting di dalam

pengelolaan lembaga keuangan dan menjadi tolok ukur kualitas pengelolaan lembaga.

Pentingnya sebuah lembaga mengelola likuiditas secara baik terutama ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan dana. Dalam mengelola likuiditas, selalu terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga likuiditas atau meningkatkan pendapatan. Lembaga yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung memelihara alat likuid yang relatif lebih besar dari yang diperlukannya dengan maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas. Namun, di sisi lain lembaga juga dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid yang berlebihan. Oleh karena itu, dalam manajemen likuiditas perlu adanya keseimbangan antara dua kepentingan tersebut.⁷

Berdasarkan data temuan awal saat penulis melakukan pra *research* di BTM Kota Tegal, disampaikan oleh pengelola BTM bahwa jumlah nominal tabungan dengan pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Pembiayaan BTM Kota Tegal

TAHUN	TABUNGAN	DEPOSITO	PEMBIAYAAN
2014	± 2,3M	±1,2M	± 4M
2015	± 3M	±800jt	± 4,3M
2016	± 3,4M	±2M	± 4,8M
2017	± 4M	±2,5M	± 5,7M
2018	± 3,6M	±2,7M	± 5,4M

Sumber : Laporan Keuangan BTM Kota Tegal, 2018.

Terlihat pada tabel bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga BTM Kota Tegal pada tahun 2014 dan 2015 cukup tinggi, melebihi nilai angka tabungan dan jumlah deposito yang dimiliki. Sedangkan pada tahun 2016-2018 dana yang

⁷ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.145.

tertampung pada BTM Kota Tegal lebih besar daripada pembiayaan. Meskipun dana pihak ketiga cukup besar dan pembiayaan rendah akan tetapi likuiditas tinggi. Hal ini sangat bermasalah bagi BTM sendiri, karena dana tersebut tidak terputarkan, sedangkan dana pihak ketiga harus berjalan sebagai mana mestinya.

Berangkat dari data temuan awal ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam manajemen likuiditas yang diterapkan BTM tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu: **“Analisis Manajemen Likuiditas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana manajemen likuiditas yang diterapkan pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal dilihat dalam Perspektif Ekonomi Islam?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal dalam mengelola likuiditas?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui manajemen likuiditas pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal dalam mengelola likuiditas.

Manfaat Penelitian:

1. Bagi Penulis
Diharapkan menjadi salah satu karya akademik yang dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai manajemen likuiditas pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal.
2. Bagi Lembaga (BTM)
Dapat memberikan informasi bagi BTM sebagai upaya meningkatkan kualitas likuiditas.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan informasi dan pengetahuan dalam pengelolaan manajemen likuiditas sehingga terinspirasi untuk melakukan likuiditas lebih baik.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai bahan telaah pustaka pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa judul skripsi yang ada kaitannya dengan skripsi yang penulis bahas, diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Linawati, yang berjudul Strategi Pengelolaan Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan likuiditas memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap kemampuan suatu lembaga untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu usaha dalam persaingan yang kompetitif. Secara garis besar, pengelolaan likuiditas sangat penting dalam menentukan serendah mungkin dana, memenuhi ketentuan sumber dana yang diperlukan suatu lembaga di dalam pemberian pembiayaan, serta untuk memenuhi kebutuhan lembaga terhadap ketentuan-ketentuan otoritas moneter dari dalam menjaga likuiditas minimum.⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purwaningsih, yang berjudul Analisis Likuiditas dan Rentabilitas untuk menilai kinerja perusahaan pada KSP Syari'ah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Surya Mentari Karanganyar Pekalongan, menjelaskan bahwa likuiditas digunakan untuk mengukur tingkat prestasi suatu lembaga yang digunakan oleh pihak manajemen dalam menyusun strategi-strategi yang akan dilakukan. Likuiditas dapat dikatakan baik apabila lembaga tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya karena asset yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan relatif kecil. Tingginya jumlah likuiditas akan mempengaruhi banyaknya dana yang menganggur, semakin banyak dana

⁸ Linawati, 2011, TA: *Strategi Pengelolaan Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus: BTM SM NU Cabang Kajen)*.

yang mengganggu menandakan bahwa pengelolaan manajemen tidak maksimal dan akhirnya lembaga tersebut tidak dapat memaksimalkan keuntungannya.⁹

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mouchammad Arif Dani, yang berjudul Upaya Meningkatkan Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyampaian Jasa. Ia menyimpulkan bahwa kinerja suatu lembaga keuangan dengan likuiditas yang rendah sangat dipengaruhi oleh keterbatasan akses sumber dana yang dimiliki lembaga keuangan. Maka dari itu, likuiditas merupakan faktor yang paling utama dalam pengelolaan keuangan. Tingkat likuiditas sangat ditentukan oleh kinerja sistem yang diterapkan harus mampu memuat seluruh elemen dalam lembaga keuangan serta menjadikannya sebagai poin utama dalam kaitannya dengan pencapaian sebuah lembaga yang ideal.¹⁰

E. KERANGKA TEORI

1. Manajemen

Manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi.¹¹ Adapun manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan pihak BTM Kota Tegal dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.

2. Likuiditas

Likuiditas adalah berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera harus dipenuhi atau kemampuan suatu bank atau suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

⁹ Dewi Purwaningsih, *Analisis likuiditas dan rentabilitas untuk menilai kinerja perusahaan*, STAIN Pekalongan, 2008.

¹⁰ Mouchammad Arif Dani, *Upaya Meningkatkan Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyampaian Jasa (Studi Kasus pada BTM UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bulak Surabaya)*

¹¹ Richard L, *Manajemen Edisi 6*. Terj. Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina. 2007, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), hlm.6.

jangka pendek.¹² Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan BTM Kota Tegal dalam memenuhi semua kewajiban pada saat jatuh tempo.

3. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas adalah suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid¹³ yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar.¹⁴ Manajemen likuiditas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rencana yang dilakukan oleh pihak BTM untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo (kewajiban jangka pendek).

4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹⁵

5. Manajemen Likuiditas dalam perspektif Ekonomi Islam

Manajemen likuiditas di bank syariah atau Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari asset dan *liability management* yang secara umum bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga.¹⁶

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan

¹²Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, (Yogyakarta: BPF, 1995), hlm.25.

¹³ Alat-alat likuid adalah Kas, Cadangan Kas, Giro pada bank sentral, Giro pada bank lain dsb. Dikutip dari: Juhaya S. Pradja, *Dasar-dasar Perbankan*, hlm.189-190.

¹⁴ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara,1997), hlm.97.

¹⁵ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, hlm. 3-4.

¹⁶ Nurul Ichsan, *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*, Universitas Prof.Dr.Hamka (Uhamka), Jakarta, 2013, hlm. 103.

data dan informasi yang ditemukan di lapangan yaitu penulis mengadakan penelitian langsung di BTM Kota Tegal Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak BTM Kota Tegal untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berhubungan dalam penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Data penelitian ini bersumber dari dua jenis data, diantaranya data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data Primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti dengan Pimpinan BTM (transkrip wawancara) dan dokumen internal BTM tentang likuiditas.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini berupa buku, laporan, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran peristiwa tersebut dan ditulis sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan tersebut berupa profil BTM, data organisasi, laporan unit usaha, serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

b) Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada pengelola BTM Kota Tegal. Dalam melakukan wawancara, sebelumnya peneliti menyiapkan serangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada pengelola BTM Kota Tegal, kemudian memberikan peluang bagi narasumber untuk memberikan jawaban.

c) Observasi (Pengamatan)

Dilakukan peneliti untuk memahami keseluruhan konteks data yang dialami objek penelitian. Dalam melakukan observasi ini, peneliti dapat mengamati secara langsung mengenai manajemen likuiditas pada BTM dan kendala-kendala yang dihadapi oleh BTM.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati. Dalam analisis deskriptif kualitatif terdapat analisis data, yaitu:

a) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya akan dipilah dan dipilih berdasarkan keterkaitan mengenai manajemen likuiditas, kemudian memfokuskan data lapangan sebagai acuan utama dalam dalam proses analisis data. Dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan selanjutnya.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini dengan menguraikan segala sesuatu mengenai manajemen likuiditas dan kendala-kendala yang dihadapi BTM Kota Tegal.

c) Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui pengambilan sample data yang dibutuhkan melalui kajian analisis sesuai dengan kajian teori yang penulis jabarkan pada teori yang dijabarkan di BAB II.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah seluruh sampel data dianalisis dengan cara menarik kesimpulan melalui pola induktif.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam memaparkan hasil penelitian, skripsi ini disusun atas lima bab dengan beberapa sub bab di dalamnya. Berikut sistematika penyusunan skripsi.

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, (penelusuran penelitian terdahulu yang sejenis), metode penelitian (meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG MANAJEMEN, LIKUIDITAS, MANAJEMEN LIKUIDITAS DAN EKONOMI ISLAM

Berisi landasan teori yang meliputi: manajemen, likuiditas, manajemen likuiditas, dan ekonomi Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) KOTA TEGAL

Berisi tentang gambaran umum Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal, meliputi latar belakang berdirinya BTM Kota Tegal, struktur kepengurusan, dan sarana prasarana.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis mengenai manajemen likuiditas pada BTM Kota Tegal.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TENTANG MANAJEMEN, LIKUIDITAS, MANAJEMEN LIKUIDITAS DAN EKONOMI ISLAM

A. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Aspek pokok dalam manajemen adalah mengenali peranan dan pentingnya orang lain. Manajer yang baik tahu bahwa satu-satunya cara mereka dapat mencapai apa pun adalah melalui orang di dalam organisasi. Ahli manajemen pada awal abad kedua puluh, Mary Parker Follet, mendefinisikan manajemen sebagai “seni untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui orang.” Baru-baru ini, ahli teori manajemen terkemuka, Peter Drucker, menyatakan bahwa pekerjaan manajer adalah untuk memberikan arahan kepada organisasi, memimpin, dan memutuskan bagaimana harusnya menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Menyelesaikan sesuatu melalui orang dan sumber daya lain, memberikan kepemimpinan, dan pengarahan merupakan hal yang dilakukan manajer. Kegiatan ini tidak hanya berlaku untuk eksekutif puncak seperti Kenneth Chenault, namun juga untuk pemimpin tim keamanan, penyelia dalam departemen akuntansi, atau seorang direktur pemasaran. Selain itu, manajemen seringkali dianggap menyeluruh karena menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan berhasil dalam mencapai kinerja yang tinggi untuk seluruh organisasi berorientasi laba maupun nirlaba. Dengan demikian, definisi manajemen (*management*) adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumberdaya organisasi.¹⁷

Aspek manajemen dalam penelitian tingkat kesehatan suatu bank dikaitkan dengan tingkat efisiensi yang dicapai bank tersebut dalam

¹⁷ Richard L. Daft, *Manajemen, Edisi 6*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006, hlm.6

menjalankan operasinya. Menurut Bank Indonesia, tingkat efisiensi bank diukur melalui perbandingan Total Biaya Operasi (BO) dengan Total Pendapatan Operasi (PO), sehingga disebut sebagai rasio BOPO. Rasio BOPO bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam menutup biaya operasional.¹⁸

2. Fungsi Manajemen

a. Perencanaan

Perencanaan menentukan dimana organisasi ingin berada di masa depan dan bagaimana agar dapat sampai kesana. Perencanaan (*planning*) berarti menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada Wells Fargo & Co., CEO Richard Kovacevich menetapkan tujuan yang sangat ambisius berupa penggandaan jumlah produk yang terjual untuk setiap pelanggan (seperti akun cek, kartu kredit, pinjaman ekuitas rumah, dan sertifikat deposito) dari empat menjadi delapan. Untuk memenuhi tujuan ini, manajer harus menginvestasikan dalam jumlah yang signifikan sumber daya untuk pelatihan dan insentif untuk memotivasi karyawan.

Kurangnya perencanaan atau perencanaan yang buruk dapat menghancurkan kinerja organisasi. Sebagai contoh, perusahaan ritel pakaian Merry-Go-Round, yang dulunya hadir secara besar-besaran di berbagai pusat belanja di Amerika, kini menjadi pailit dan akhirnya menghilang akibat dari perencanaan yang buruk. Visi yang kurang baik dari para manajer puncak dalam memperkirakan arah pasar dan tren demografi, upaya perencanaan yang lemah berkaitan dengan akuisisi dan pertumbuhan, serta kegagalan untuk mempersiapkan sukses manajemen telah membantu menutup jaringan nasional yang terdiri dari 1.500 toko senilai \$1 miliar.

¹⁸ Tri Hendro, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hlm.206

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian umumnya dilakukan setelah perencanaan dan mencerminkan bagaimana perusahaan mencoba untuk mencapai rencananya. Pengorganisasian (*organizing*) meliputi penentuan dan pengelompokan tugas ke dalam departemen, penentuan otoritas, serta alokasi sumber daya di antara organisasi. Hewlett-Packard, Sears, Xerox, dan Microsoft seluruhnya telah melakukan reorganisasi struktur untuk mengakomodasi perubahan rencana. Wells Fargo, perusahaan bank terbesar keempat di Amerika, merupakan sebuah organisasi terdesentralisasi yang mendorong kekuasaan pengambilan keputusan hingga ke bank-banknya di tingkat lokal. Kovacevich yakin bahwa struktur desentralisasi memungkinkan perusahaan yang besar menyediakan produk dan jasa yang akan meledak, sambil tetap responsif terhadap pelanggan dalam sebuah bank masyarakat yang kecil.

c. Kepemimpinan

Memberikan kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang semakin penting. Kepemimpinan (*leading*) merupakan penggunaan pengaruh untuk memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Memimpin berarti menciptakan budaya dan nilai bersama, mengomunikasikan tujuan kepada karyawan diseluruh organisai, dan memberikan masukan kepada karyawan agar memiliki kinerja dengan tingkat yang lebih tinggi. Memimpin juga melibatkan pemberian motivasi kepada seluruh departemen, divisi dan individu yang bekerja langsung dengan manajer. Dalam era yang penuh ketidakpastian, kompetisi internasional, dan keragaman tenaga kerja yang semakin meningkat, kemampuan untuk membentuk budaya, mengomunikasikan tujuan, dan memotivasi karyawan merupakan hal yang penting untuk keberhasilan usaha.

Beberapa manajer terkenal, seperti Herb Kelleher, yang baru saja pensiun sebagai CEO Southwest Airlines dan Michael Dell dari Dell Computer, dikenal sebagai pemimpin yang luar biasa. Mereka mampu mengomunikasikan visi mereka ke dalam organisasi dan memberikan energi kepada karyawan melalui tindakan. Kepemimpinan Kelleher, misalnya, membantu para karyawan Southwest menjadi yang paling produktif di industri penerbangan. Namun demikian di Southwest, kepemimpinan dialirkan ke bawah ke seluruh perusahaan, dan setiap orang didorong untuk mengambil tanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan saling memotivasi. Memberikan kepemimpinan berarti membantu orang menjadi, dan melakukan yang terbaik untuk organisasi. Kotak Orang sebagai Prioritas menjelaskan pendekatan kepemimpinan Joe Torre, pelatih kepala New York Yankees.

Seseorang tidak harus menjadi manajer ternama untuk menjadi pemimpin terkemuka. Banyak sekali manajer yang bekerja secara diam-diam juga memberikan kepemimpinan yang kuat di dalam departemen, tim organisasi nirlaba, dan usaha kecil. Valeria Maltoni adalah seorang spesialis pemasaran pada Destiny WebSolution, di mana ia memimpin tim yang membantu klien dalam menyelesaikan persoalan bisnis *online*. Filosofi kepemimpinan Maltoni adalah bahwa pemimpin membuka diri mereka sendiri terhadap ide dan pendapat orang lain. Ia berkata, “Tidak apa-apa untuk meminta tolong. Dalam segala situasi, ketika saya berpikir bahwa saya memiliki lebih banyak untuk memberi daripada yang saya harus terima, maka saya salah.”

d. Pengendalian

Pengendalian merupakan fungsi keempat dalam proses manajemen. Pengendalian (*controlling*) berarti mengawasi aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya, dan melakukan koreksi bila diperlukan. Manajer harus memastikan bahwa organisasi bergerak menuju tujuannya. Tren baru berupa pemberdayaan dan kepercayaan terhadap karyawan telah menyebabkan banyak perusahaan tidak lagi terlalu menekankan kontrol dari atas ke bawah, dan lebih menekankan pada pelatihan karyawan untuk memantau dan mengoreksi mereka.

Teknologi informasi yang baru juga membantu manajer dalam melakukan kontrol organisasi yang diperlukan tanpa batasan atas-bawah yang ketat. Dengan menggunakan Internet dan teknologi informasi lainnya untuk mengoordinasikan dan memantau hampir setiap aspek operasi, manajer pada Cisco System dapat mengawasi secara dekat kinerja karyawan dan perusahaan tanpa melakukan kontrol yang otoriter setiap harinya terhadap karyawan. Para karyawan Cisco memiliki kebebasan yang luar biasa besar untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan sebagai contoh, setiap karyawan dapat terbang kemana saja di dunia ini tanpa persetujuan terlebih dahulu, namun, mereka juga tahu bahwa manajer puncak sangat memerhatikan apa yang terjadi di keseluruhan perusahaan hanya dengan mengeklik *mouse*.

Perusahaan juga dapat menggunakan teknologi informasi untuk menempatkan lebih banyak hambatan kepada karyawan jika manajer yakin bahwa situasi memang menuntut hal demikian. Manajer pada C.R. England, sebuah perusahaan transportasi truk berpendingin jarak jauh, melakukan sistem kontrol komputer yang ketat ketika perusahaan berada di tepi jurang kebangkrutan. Sistem tersebut mengawasi 500 prosedur, dan manajer menilai karyawan

setiap minggunya berdasarkan data yang terkomputerisasi. Meskipun perusahaan tidak selalu menyukai kontrol yang dekat seperti itu, hal ini membantu dalam menyelamatkan perusahaan. Kegagalan organisasi seringkali merupakan ketidakseriusan manajer terhadap kontrol atau kurangnya informasi untuk kontrol.¹⁹

B. Likuiditas

1. Pengertian Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya setiap saat. Dalam kewajiban di atas termasuk penarikan yang tidak dapat diduga seperti *commitment loan* maupun penarikan-penarikan tidak terduga lainnya.²⁰

Likuiditas merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai. Bank dianggap likuid kalau bank tersebut mempunyai cukup uang tunai atau aset likuid lainnya, disertai kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dengan cepat dari sumber lainnya, untuk memungkinkannya memenuhi kewajiban pembayaran dan komitmen keuangan lain pada saat yang tepat. Selain itu, harus pula ada likuiditas penyangga yang memadai untuk memenuhi hampir setiap kebutuhan uang tunai yang mendesak. Jadi yang dimaksud likuiditas adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang tunai dan alat-alat likuid lainnya yang dikuasai bank yang bersangkutan.²¹

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang harus segera dibayar. Kewajiban

¹⁹ Richard L. Daft, *Manajemen, Edisi 6*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006, hlm.6

²⁰ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.145

²¹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm.59

tersebut sering diartikan sebagai hutang. Pengertian ini berlaku pada perusahaan non bank yang memandang kewajiban riil saja yang tercermin di sisi pasiva pada neraca.²² Likuiditas sebuah bank menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya dan/atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lain.²³

2. Pengendalian Likuiditas

Konsep likuiditas didasarkan atas kegiatan bank komersil dan pengelolaan dananya. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang mendasar pada dunia perbankan. Risiko likuiditas adalah kemungkinan kerugian yang disebabkan karena usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan akan adanya uang kas dalam rangka pemenuhan kebutuhan nasabah. Kemungkinan kerugian terjadi karena keharusan menjual aset atau mengumpulkan dana dalam waktu singkat untuk menghadapi situasi keuangan tertentu.

Sejak dulu dunia perbankan memerlukan likuiditas dan likuiditas menjadi salah satu faktor penting dalam pengelolaan dananya. Karena adanya proporsi yang besar dari simpanan nasabah bank berupa giro (DD: *Demand Deposit*) atau Tabungan (*saving*) dan deposito berjangka (*Time Deposit*), dunia perbankan, terutama dalam hal hukum perbankan memberikan prioritas utama dalam mempertahankan tingkat kecukupan likuiditas. Harus ada nasabah yang menyimpan uang di bank apabila bank ingin melanjutkan usahanya. Diperlukan juga likuiditas yang cukup apabila bank ingin memenuhi permintaan kredit yang tidak terduga dari nasabah.

Penolakan akan suatu permintaan kredit mungkin akan mengakibatkan kemungkinan kehilangan nasabah yang akan menyimpan uangnya atau bahkan kehilangan calon nasabah prima.

²² Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik & Aplikasi+Banking Risk Assessment*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006, hlm.96

²³ Tri Hendro, *Bank&Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hlm.207

Jadi bank harus melindungi diri sendiri dari risiko likuiditas dengan mempertahankan tingkat likuiditas tertentu yang mencukupi atau harus mampu dalam menyediakan dana dalam rangka mendapatkan likuiditas yang memadai. Bank seharusnya dapat mengatur posisi keuangannya searah dengan tujuan jangka pendek dan tujuan utama bank. Tujuan utama suatu bank komersial adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan terlalu rendahnya tingkat likuiditas atau terlalu tingginya likuiditas berlawanan satu sama lain. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa bila diinginkan *profitability* yang tinggi, tingkat *liquidity* akan berkurang.²⁴

3. Teori Likuiditas

Ada empat macam teori likuiditas perbankan yang dikenal, yaitu sebagai berikut:

a. *Commercial Loan Theory*

Teori ini dianggap paling kuno, nama lain dari teori ini adalah *real bills doctrine*. Teori ini mulai dikenal sekitar 2 abad lalu. Kajian teori ini dilakukan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal *The Wealth of Nation* yang diterbitkan tahun 1776. Teori ini beranggapan bahwa bank hanya boleh memberikan pinjaman “dengan surat dagang jangka pendek yang dapat dicairkan dengan sendirinya (*self liquidating*).” *Self liquidating* berarti pemberian pinjaman mengandung makna untuk pembayaran kembali.

b. *Shiftability Theory*

Shiftability Theory atau teori tentang aktiva yang dapat dipindahkan dan teori ini beranggapan bahwa likuiditas sebuah bank tergantung pada kemampuan bank memindahkan aktivanya ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Dengan demikian, misalnya, dapat diterima bagi bank untuk berinvestasi pada pasar terbuka jangka pendek dalam portofolio

²⁴ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.147-148

aktivanya. Jika dalam keadaan ini sejumlah depositors harus memutuskan untuk menarik kembali uang mereka, bank hanya tinggal menjual investasi tersebut, mengambil yang diperoleh (atau dibeli), dan membayarnya kembali kepada depositornya.

c. *Anticipated Income Theory*

Sebagai teori yang dikenal tahun 1940 yang menonjol di Amerika Serikat, yaitu teori pendapatan yang diharapkan (*the anticipated income theory*) ini, berarti semua dana yang dialokasi atau setiap upaya mengalokasikan dana ditujukan pada sektor yang *feasible* dan layak yang akan menguntungkan bagi bank.

d. *The Liability Management Theory*

Maksud teori ini adalah bagaimana bank dapat mengelola pasivanya sedemikian rupa sehingga pasiva itu dapat menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang diperlukan bagi bank adalah: (1) untuk menghadapi penarikan oleh nasabah; (2) memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo; (3) memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah.²⁵

4. Pengukuran Likuiditas

Cara-cara pengukuran likuiditas yang lama (*cash ratio*) tidak dapat memberi indikasi apakah suatu bank mempunyai tingkat likuiditas yang cukup atau tidak. Akan tetapi, apabila dipergunakan secara tepat, pengukuran ini dapat mengindikasikan adanya perubahan pada likuiditas bank pada suatu periode tertentu. Pendekatan secara umum untuk ukuran likuiditas mencakup perbandingan antara *liquid asset* dengan beberapa sumber dana bank.

Diakui memang sangat sulit untuk mengukur seberapa banyak likuiditas yang memadai untuk suatu bank karena permintaan atau kebutuhan nasabah akan dana tidak pasti atau sulit untuk diperkirakan.

²⁵ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.146-147

Jumlah likuiditas yang diinginkan pada dasarnya ditentukan oleh perubahan tingkat deposito atau simpanan yang ada di bank dan permintaan nasabah akan kredit ataupun transaksi lainnya.

Ada beberapa kendala perekonomian yang memengaruhi tingkat simpanan masyarakat di bank dan permintaan nasabah akan kredit, yaitu:

- a. Kejadian yang jarang terjadi, sifatnya jangka pendek;
- b. Faktor-faktor musiman;
- c. Faktor-faktor daur usaha;
- d. Kejadian-kejadian jangka panjang.

Semua kejadian yang sifatnya “cyclical” akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh bank setiap tahunnya. Meskipun ketidakpastian selalu ada, bank dapat mengadakan suatu tindakan sebagai pertahanan, yaitu dengan mempelajari pola perilaku nasabah dapat mengurangi unsur ketidakpastian.

Tindakan lain adalah dengan likuiditas terencana yang didasarkan kepada perkiraan akan permintaan kredit dan perkiraan deposito. Meskipun dapat diperkirakan, karena adanya permintaan kredit yang tidak terduga, dan penarikan deposito yang tidak terduga ada saja kemungkinan salah pada perkiraan (*forecasting*) tersebut.²⁶

C. Manajemen Likuiditas

1. Pengertian Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas merupakan aspek penting dalam manajemen bank. Di satu sisi sumber dana biasanya bersifat jangka pendek sedang di sisi lain perkreditan bersifat jangka panjang. oleh karena itu sebuah bank berada pada posisi yang berpotensi tidak likuid (*illiquid*). Potensi tidak likuid semacam itu harus direncanakan, yakni membuat estimasi jumlah kebutuhan likuiditas dan menetapkan strategi untuk penyediaan

²⁶ Veithzal Rivai, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hlm.150

likuiditas baik menyangkut jumlah yang diperlukan maupun kapan waktunya.

Manajemen bank melalui perencanaan yang cermat dan antisipasi terhadap perubahan tabungan dan kredit dapat mengendalikan likuiditas bank. Manajemen dapat menetapkan kebijakan jumlah likuiditas yang relatif besar atau kecil terhadap antisipasi kebutuhan dana tergantung pada preferensi risiko, faktor-faktor risiko, dan pertimbangan lain. Dalam menetapkan kebijakan semacam itu, manajer keuangan harus memahami korelasi antara likuiditas dan profitabilitas. Korelasi ini tercermin dari kurva hasil (*yield curve*) yang mempunyai *slope* positif suku bunga yang lebih tinggi berkaitan dengan aset keuangan yang berjangka lebih panjang dan kurang likuid, sedangkan suku bunga yang lebih rendah berkaitan dengan aset keuangan yang berjangka lebih pendek dan lebih likuid. Pihak manajemen dapat meminimalisasi likuiditas, menggunakan dana dari penjualan aset likuid untuk diinvestasikan pada aset keuangan yang berjangka lebih panjang agar memperoleh penghasilan yang lebih tinggi.

Posisi likuiditas sebuah bank dapat diukur dari rasio jumlah kas terhadap aset total, rasio jumlah sekuritas pemerintah terhadap aset total dan rasio sekuritas lain terhadap aset total. Tidak semua sekuritas bersifat jangka pendek dan tidak semua kas (misalnya cadangan wajib) tersedia untuk memenuhi penarikan tabungan dan kredit. Lebih dari itu likuiditas dapat dipenuhi dari sekuritas lain dan portofolio kredit. Perlu diketahui pula bahwa likuiditas juga dapat disediakan melalui pinjaman maupun likuiditas aset.

Dalam perspektif manajemen aset, kebutuhan likuiditas bank umum dipenuhi dengan cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer yaitu jumlah kas untuk memenuhi kebutuhan cadangan wajib dan untuk keperluan operasional. Walaupun jenis aset ini tidak seluruhnya tersedia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas,

cadangan primer tetap merupakan garis pertahanan pertama terhadap permintaan kas sehari-hari. Sementara itu sebagian besar likuiditas dari portofolio aset bank umum berasal dari cadangan sekunder. Cadangan sekunder adalah aset yang terutama ditujukan untuk keperluan likuiditas. Jenis aset ini dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat dengan risiko kehilangan nilai yang kecil. Termasuk jenis aset ini adalah sekuritas berjangka pendek seperti *treasury bills* dan sebagian dari portofolio kredit seperti *commercial paper*.

Perkembangan di perbankan belakangan ini menunjukkan adanya dua trend penting. Yang sangat jelas adalah penurunan tajam dari pemilikan aset likuid dan perubahan cara bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Karena dihadapkan dengan meningkatnya permintaann kredit, biaya dana dan pegawai serta tekanan terhadap profit margin, pihak manajemen bank berusaha keras untuk mengurangi aset sangat likuid berjangka pendek. Perkembangan lain yakni bergesernya titik berat dari manajemen aset (*asset management*) ke arah manajemen kewajiban (*liability management*). Bank umum, terutama yang berskala besar, semakin mengandalkan pada dana pinjaman bukan tabungan sebagai sumber likuiditas. Hal ini diakibatkan oleh perkembangan yang terjadi di pasar dana. Dengan kata lain manajemen likuiditas bank, mencakup manajemen portofolio total, menggunakan aset dan kewajiban (*liabilities*) bersama-sama sebagai bagian dari perencanaan manajemen.²⁷ Manajemen Likuiditas merupakan fungsi kunci dari perbankan dan bagian integral dari proses manajemen aset kewajiban.²⁸

²⁷ Sawaldjo Puspoproto, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori, dan Realita*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hlm.130-132

²⁸ Hannie van Greuning, *Analisis Risiko Perbankan, Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm.163

2. Pendekatan dalam Manajemen Likuiditas

Dalam teori likuiditas ada berbagai cara untuk memenuhi likuiditas. Berbagai teori tersebut kemudian menjadi pedoman bagi bank, yang dalam perkembangannya teori tersebut mengilhami pendekatan yang dilakukan bank. Pendekatan manajemen likuiditas pada prinsipnya ada dua macam yaitu pendekatan aktiva dan pendekatan pasiva.

a. Pendekatan Likuiditas Aktiva (*Assets Liquidity*)

Secara historis pada aktiva merupakan sumber utama bagi bank untuk memenuhi kebutuhan kas. Instrumen pasar uang, seperti obligasi jangka pendek dan sekuritas jangka pendek lainnya adalah termasuk alat likuid didalam konteks ini karena dapat dijual segera dengan kerugian yang minimal. Permintaan kredit dan penarikan deposito yang secara relatif besar adalah dipenuhi melalui likuiditas instrumen pasar uang semacam ini. Kebutuhan likuiditas yang lain dapat ditutup dengan aktiva berupa kas, termasuk *vault cash*, Giro di Bank Sentral, simpanan pada bank lain dan persediaan kas lainnya seperti kas dalam proses inkaso, sebagai tambahan dapat berupa kas dan sejenisnya dari bank, yang disimpan di bank lain.

Pendekatan aktiva ini telah mendominasi manajemen bank sampai tahun 1960-an, ketika manajemen pasiva menjadi populer sebagai alat alternatif untuk mengelola kebutuhan kas. Pendekatan pasiva meliputi perolehan sumber dana *demand deposit* dan nondeposit untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Pendekatan ini setidaknya secara substantif telah mengubah pola manajemen likuiditas di dunia perbankan.

b. Pendekatan Likuiditas Pasiva (*Liability Liquidity*)

Pendekatan alternatif pada manajemen likuiditas adalah membeli kebutuhan dana untuk memenuhi permintaan kredit dan

penarikan simpanan masyarakat. Dalam bagian ini manajemen pasiva akan disajikan secara singkat dalam konteks likuiditas.

Ada perbedaan substansial antara bank kecil dan bank besar di dalam penggunaan manajemen pasiva. Bank besar yang aktif di pasar uang mempunyai keuntungan secara alami daripada bank-bank yang kecil dalam hal kemampuan untuk membelanjai, atau secara efektif menaikkan dana melalui *call money*, *repurchase agreement*, deposito antar bank, dan jenis-jenis pembelian dana yang lain. Sebaliknya bank kecil sering memperoleh dana melalui pasar uang melalui bank-bank koresponden melalui *exchange of money market service*. Pada neraca bank koresponden tampak saldo dapat diberikan sebagai sumber dana tambahan likuiditas aktiva untuk bank kecil dan sebagai dana tambahan pada manajemen pasiva bagi bank besar.²⁹

3. Kebijakan Manajemen Likuiditas

Dalam operasi harian, manajemen likuiditas biasanya dicapai melalui manajemen aset bank. Dalam istilah menengah, likuiditas juga ditangani melalui manajemen struktur kewajiban bank. Tingkat likuiditas yang dianggap cukup bagi suatu bank bisa saja tidak memadai bagi bank lain. Suatu posisi likuiditas bank tertentu juga dapat bervariasi mulai dari yang memadai hingga tidak memadai berdasarkan kebutuhan dana yang diantisipasi pada setiap waktu. Penilaian mengenai kecukupan posisi likuidasi memerlukan analisis persyaratan dana historis bank, posisi likuiditasnya saat ini dan kebutuhan dana di masa mendatang, pilihan-pilihan yang dimilikinya untuk mengurangi kebutuhan dana atau memperoleh dana tambahan, beserta sumber dananya.

Jumlah harta atau aset lancar yang siap dipasarkan harus dimiliki oleh suatu bank bergantung pada stabilitas struktur simpanannya dan

²⁹ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik & Aplikasi+Banking Risk Assessment*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006, hlm.99-100

potensi pengembangan portofolio pinjaman cepat. Umumnya, jika deposit terdiri dari rekening-rekening kecil yang stabil, maka suatu bank memerlukan likuiditas yang relatif kecil. Posisi likuiditas yang lebih tinggi biasanya diperlukan ketika porsi substansial portofolio pinjaman terdiri dari pinjaman besar jangka panjang, ketika bank memiliki konsentrasi deposit yang cukup tinggi, atau ketika tren terbaru menunjukkan pengurangan rekening deposito perusahaan atau kepemilikan besar. Situasi di mana bank harus meningkatkan posisi likuiditasnya juga dapat timbul, misalnya, ketika komitmen besar telah dibuat pada sisi aset dan bank tersebut mengharapkan klien untuk memulai penggunaan. Kebijakan manajemen likuiditas suatu bank biasanya terdiri dari struktur pengambilan keputusan, suatu pendekatan terhadap dana dan operasi likuiditas, sejumlah batasan terhadap pemaparan risiko likuiditas, dan sejumlah prosedur untuk merencanakan likuiditas dalam skenario-skenario alternatif, termasuk situasi krisis. Struktur pengambilan keputusan mencerminkan pentingnya likuiditas bagi manajemen: bank yang menekankan pentingnya likuiditas biasanya melembagakan struktur manajemen risiko likuiditas dalam ALCO dan membebankan tanggung jawab untuk menentukan kebijakan serta meninjau keputusan likuiditas bagi tingkat manajemen tertinggi bank. Strategi bank untuk pendanaan dan operasi likuiditas, yang harus disetujui oleh dewan, menentukan kebijakan spesifik terhadap aspek-aspek tertentu dari manajemen risiko, seperti struktur kewajiban target, penggunaan instrumen keuangan tertentu, atau pemberian harga deposit.

Kebutuhan akan likuiditas biasanya ditentukan oleh konstruksi tingkat jatuh tempo yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran kas yang diharapkan selama periode waktu tertentu. Perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran dalam setiap periode (yakni kelebihan

atau kekurangan dana) memberikan titik awal untuk mengukur keuntungan atau kerugian likuiditas suatu bank setiap waktu.³⁰

4. Pengertian Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Manajemen Likuiditas Bank diartikan sebagai suatu program pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Likuiditas bank biasanya disebut alat likuid atau *reserve requirement* atau simpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk giro dalam jumlah yang ditentukan, disebut Giro Wajib Minimum (GWM). Dengan demikian, suatu bank syariah dikatakan likuid apabila:

- a. Dapat memelihara GWM di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden. Giro di Bank Koresponden adalah rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan Saldo Minimum.
- c. Dapat memelihara sejumlah Kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

✚ Ciri-Ciri Bank Yang Memiliki Likuiditas Sehat

Dengan melakukan manajemen likuiditas maka Bank akan dapat memelihara likuiditas yang dianggap sehat dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki sejumlah alat likuid, *cash asset* (uang kas, rekening pada bank sentral dan bank lainnya) setara dengan kebutuhan likuiditas yang diperkirakan.
- b. Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi memiliki surat-surat berharga yang segera dapat

³⁰ Hannie van Greuning, *Analisis Risiko Perbankan, Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm.167

dialihkan menjadi kas, tanpa harus mengalami kerugian baik sebelum atau sesudah jatuh tempo.

c. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang, misalnya dengan menjual surat berharga dengan *repurchase agreement*.

d. Memenuhi ratio pengukuran likuiditas yang sehat yaitu:

1) Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga:

(a) Merupakan ukuran untuk menilai kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas akibat penarikan dana oleh pihak ketiga dengan menggunakan alat likuid bank yang tersedia.

(b) Alat likuid bank terdiri atas uang kas, saldo giro pada bank sentral dan bank koresponden.

(c) Semakin besar rasio ini semakin besar kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi disisi lain mengidentifikasi semakin besarnya *idle money*.

2) Rasio pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga (FDR)

(a) Finance to Deposit Ratio (FDR), yang menggambarkan perbandingan pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah DPK yang disalurkan.

(b) Ratio ini harus dipelihara pada posisi tertentu yaitu 75-100%. Jika ratio di bawah 75% maka bank dalam kondisi kelebihan

likuiditas, dan jika rasio diatas 100% maka bank dalam kondisi kurang likuid.

Menurut kriteria Bank Indonesia, ratio sebesar 115% keatas nilai kesehatan likuiditas bank adalah nol.³¹

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi pada awalnya diambil dari bahasa Yunani yakni 'oikos' dan 'nomos' yang berarti peraturan rumah tangga. Kata rumah tangga bukan hanya merujuk pada suami, istri dan anak-anak, akan tetapi maknanya yang lebih luas, yaitu rumah tangga negara, bangsa dan dunia. Seiring perkembangan zaman, ekonomi erat kaitannya dengan kebutuhan hidup manusia yang meliputi sandang dan pangan dengan jangkauan yang luas.

Berbicara ekonomi yang memiliki korelasi dengan ajaran Islam, maka perlu menelaah teori yang digagas oleh para pakar dari kalangan ekonomi Islam. M. Umer Chapra sebagaimana disebutkan dalam buku *Ekonomi Makro Islam*, mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang dengannya terealisasi kebahagiaan manusia melalui pengalokasian sumberdaya terbatas serta pendistribusiannya yang mengacu pada koridor ajaran Islam dengan adanya batasan-batasan individu untuk keseimbangan lingkungan.³²

Secara terminologi, pengertian Ekonomi Islam dipaparkan oleh para ahli secara beragam. Antara lain menurut Muhammad bin Abdullah Al-Arabi memberikan definisi Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. M. Syauki al-Fanjari

³¹ <http://metrook.blogspot.com/2012/12/makalah-liquiditas-bank-syariah.html?m=1> diakses pada tanggal 10 November 2018, pukul 22:25 WIB

³² Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat (Upaya Menggali Petunjuk Al-Qur'an Dalam Mewujudkan Kesejahteraan)*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018, hlm. 9-11.

mendefinisikan ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya.³³

Dari pendapat para pakar dengan merujuk berbagai teori di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu rancangan dasar sistem pengelolaan sumberdaya yang mempunyai nilai. Sumberdaya tersebut baik materi maupun non materi sebagai bagian dari memenuhi kebutuhan hidup dengan batasan-batasan tertentu. Jika melihat objek dari ekonomi Islam, maka objek ekonomi sebagaimana dikenal luas yakni harta. Dalam ekonomi Islam pemberdayaan harta sebagai sarana memenuhi kebutuhan hidup tidak terlepas dari sumber ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana tuntunannya.³⁴

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam yang merupakan salah satu bentuk dari sekian banyak jenis mu'amalah Islami tentunya sejalan dan berbanding lurus dengan kaidah-kaidah Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai ruh-ruh dan karakteristik tersendiri. Dawabah menyebutkan setidaknya ada 5 (lima) jenis karakteristik ekonomi Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Spirit ketuhanan (*Robbaniyah*)

Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah sebuah agama yang merujuk semua perkaranya kepada Allah dengan konsep ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan segala kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan. Tentunya ini sangat berbeda dengan sistem-sistem ekonomi konvensional yang tujuannya hanya memberi kepuasan pada diri tanpa merujuk atau bertujuan selain dari itu. Maka sebagaimana Islam selalu menanamkan akhlaq dan adab dalam segala aspek kehidupan diterapkan pula dalam hal interaksi perekonomian. Islam telah

³³ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018, hlm. 3-4.

³⁴ Bustanul Karim, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat (Upaya Menggali Petunjuk Al-Qur'an Dalam Mewujudkan Kesejahteraan)*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018, hlm.11.

mengajarkan bahwa manusia merupakan pemimpin di muka bumi sebagaimana firman-Nya “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.” (QS. Al-Baqarah: 30), kemudian dilanjutkan dengan ayat Al-Hud 61; “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.” Ditambah lagi dengan firman-Nya dalam QS. AL-Hadid: 7 “Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.” Jelas penuturan ayat-ayat di atas jelas sudah rujukan serta tujuan dari sistem ekonomi Islam, yaitu sebuah asas ketuhanan, sehingga nantinya dapat menciptakan masyarakat yang tentram serta seimbang perekonomiannya.

b. Keseluruhan (*syumûliyah*)

Sistem ekonomi Islam tidak lain merupakan sebuah cakupan dari ketetapan-ketetapan yang berlaku dalam Islam. Karena Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan yang masuk di dalamnya aspek perekonomian. Dengan masuknya ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan dalam Islam, maka tidak mungkin ada produsen yang memproduksi barang di dasarkan atas kemauannya saja. Tetapi dia juga pasti mempertimbangkan akan halal dan haramnya. Para produsen tidak juga memproduksi sesuatu yang mengandung hal-hal membahayakan konsumen atau lingkungannya. Dan berbagai perbuatan lainnya akan disesuaikan dengan aspek dan ketentuan yang ada dalam Islam.

c. Fleksibilitas (*murûnah*)

Kaidah-kaidah dalam Islam bersifat *shôlihun likulli zamân wa makân*. Dengan bahasa yang mudah dipahami adalah bisa diaplikasikan dalam berbagai dimensi waktu dan tempat. Tentunya hal itu berkaitan erat dengan *tsawabit* (sesuatu yang sudah tetap) serta *mutaghayyirat* (hal yang masih berubah-ubah) yang berasaskan hal-hal *ushul* (pokok) dalam agama dan *furu'nya*

(cabang). Dengan model yang disebutkan tadi berbagai macam kejadian bisa disesuaikan dengan hukum-hukum fiqh yang ada. Fleksibilitas yang dimaksud di sini harus lebih ditinjau lagi. Rif'at Audhy di salah satu bab dalam buku *Mausu'atul Hadhoroh al Islamiyah* menerangkannya dengan cukup jelas. Fleksibilitas dalam Islam mempunyai sisi yang tidak bisa diterima dan ada yang bisa. Adapun sisi yang tidak diterima yaitu ketika suatu permasalahan bisa dihukumi dengan dua hukum yang berbeda sesuai perbedaan kondisi alias kondisional. Karena yang seperti itu sama saja mengatakan bahwa yang hukum-hukum Islamlah yang menyesuaikan keadaan, dan bukannya keadaan yang merujuk pada hukum Islam. Sisi yang bisa diterima adalah ketika syariah yang *sholih likulli zaman wa makân* ini mampu menghukumi perkembangan zaman.

Ibnu Taimiyah menyatakan perbuatan seorang hamba itu ada dua jenis: ibadah yang dengannya orang memperbaiki agama mereka dan adat kebiasaan yang dibutuhkan di dunia. Ibadah adalah sesuatu hal. Dengan adanya pokok-pokok syariah, maka kita mengetahui bahwa ibadah yang ditetapkan olehNya tidak akan sah kecuali dengan ketentuan yang ditetapkan syariah.

d. Keseimbangan (*tawâzun*)

Islam dan berbagai aspek hidupnya selalu berdasarkan keseimbangan antara dua sisinya. Sebagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat dan juga keseimbangan antara iman dan perekonomian serta keseimbangan antara boros dan kikir. Islam juga memberi keselarasan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan materi dengan memberi porsi yang sesuai antara keduanya. Sebagaimana tersirat dalam firmanNya Surah Al-Qashash ayat 77 “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikamatan) duniawi”. Hal penting lain dari

konsep keseimbangan ini adalah sebuah sikap yang tidak condong pada kapitalis ataupun sosialis. Islam memiliki batasan-batasannya sendiri antara kepentingan negara dan individual dalam ekonomi sehingga dapat menyeimbangkan antara keduanya. Asas dari kepemilikan dalam Islam adalah kepemilikan individual karena hal itu dianggap sesuatu yang fitrah dalam Islam. Karena kepemilikan individual ini merupakan pemeran utama dalam kinerja produksi, sedangkan kepemilikan umum baru dianggap pada saat-saat tertentu sehingga memaksa negara untuk turun tangan dalam menyelesaikannya. Jelas sudah bahwa intervensi negara dalam ekonomi Islam tidaklah sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan individual. Bahkan ia menjadi unsur pelengkap untuk menciptakan masalah umum. Hal itu bisa disaksikan lagi dengan adanya kewajiban zakat yang dikeluarkan oleh individual untuk selanjutnya dikelola oleh negara.

e. Keuniversalan (*'âlamiyah*)

Konsep keuniversalan ini sudah ada sejak diutusnya Rasul ke atas bumi, karena tidak lain diutusnya Rasul adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, AL-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 menyatakan "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Keuniversalan ekonomi Islam semakin terasa jelas setelah datangnya krisis global yang melanda AS dan belahan negara lain pada tahun 2008.

Unsur 5 (lima) tersebut di atas menggambarkan bagaimana Islam mengatur manusia dalam menjalankan perekonomian dan bisnisnya di dunia tanpa mengesampingkan kebaikan dan keberkahan sehingga hubungan antara manusia dan manusia dapat berjalan dengan baik.³⁵

³⁵ Elsa Gustia Irana, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, Universitas Lampung, 2015.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam memiliki beberapa landasan atau dasar hukum yang menopang dan mengawasi dalam kinerjanya. Ada beberapa prinsip yang harus diketahui, antara lain:

a. Tauhid

Tauhid atau keimanan yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia merupakan sebuah wujud penghambaan terhadap Allah SWT.

b. Masalah dan falah

Dalam Islam, tujuan ekonomi yaitu untuk kemaslahatan umat, jadi dengan adanya ekonomi diharapkan kehidupan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera. Selain itu dengan adanya kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan taraf kehidupannya lebih tinggi, hal ini sering disebut dengan falah. Arti kata falah bisa dilihat dari dua perspektif yaitu dalam dimensi dunia dan dimensi akhirat. Dilihat dari dimensi dunia, falah bisa diartikan sebagai keberlangsungan hidup, kebebasan dari segala bentuk kemiskinan, pembebasan dari segala kebodohan serta kepemilikan dari kekuatan dan sebuah kehormatan. Sedangkan jika dilihat dari segi akhirat, falah diartikan sebagai sesuatu yang abadi dan mulia seperti hidup yang kekal abadi, kesejahteraan yang kekal serta kemuliaan yang abadi selamanya.

Sedangkan untuk masalahat yaitu segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan sebuah manfaat bagi semua orang. Jadi pada dasarnya segala aktivitas perekonomian tidak boleh mengandung sebuah hal yang dapat merugikan suatu pihak dalam aktivitasnya. Karena hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam.

c. Khalifah

Khalifah merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang oleh ekonomi syariah. Karena bahwasannya yang menjalankan roda perekonomian adalah sumber daya manusia yang ada.

Tentunya hal ini menjadi sorotan khusus, dimana manusia harus menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Dimana manusia harus menjaga dan mamakmurkan bumi. Jadi dapat disimpulkan dalam menjalankan roda perekonomian manusia harus memperhatikan segala aspek agar tidak menyeleweng dari nilai-nilai Islamiyah. Segala bentuk kecurangan atau penipuan dan perbuatan negatif lainnya sungguh dilarang dalam ekonomi Islam.

d. Al-amwal (harta)

Dalam ekonomi syariah, harta dikenal sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam Islam harta yang kekal hanyalah milik Allah SWT. Dalam hal ini manusia hanya mampu untuk mengolah, menikmatinya saja dan semua itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini muncul karena ingin merespon sistem konvensional yang mengatakan bahwasannya harta adalah kepemilikan absolut dan mutlak untuk individu itu sendiri tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam. Untuk itulah dalam ekonomi Islam konsep yang diterapkan adalah harta dalam bentuk apapun jumlahnya hakikatnya semua itu milik Allah semata dan manusia hanya mendapat amanah dari Allah.

e. 'Adl (keadilan)

Dalam perekonomian Islam atau syariah, keadilan sangat ditekankan dan telah menjadi kewajiban di setiap aktivitasnya. Keadilan disini diartikan sebagai perilaku dimana menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dimana prinsip ekonomi harus menerapkan dan melayani semua masyarakat tanpa memandang apapun kaya atau miskin harus mendapatkan pelayanan yang baik. Keadilan dalam ekonomi syariah diterapkan dengan tujuan agar semua masyarakat dari semua golongan merasakan kenyamanan dan kesamaan diantara satu dan lainnya.

f. Ukhuwah (persaudaraan)

Ukhuwah atau persaudaraan merupakan salah satu tujuan atau misi adanya ekonomi syariah. Dimana segala aktivitas ekonomi dilakukan agar umat Islam menyatu dalam koridor yang sama untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran yang sama. Dalam ekonomi Islam atau syariah sangat dianjurkan untuk bekerja sama atau selalu berjamaah dalam melakukan apapun, jangan sampai umat Islam memiliki pandangan ingin sukses sendiri, ingin kaya sendiri. Namun yang benar kita harus selalu bersama ketika ada seseorang yang membutuhkan harus kita bantu dan begitu sebaliknya. Dengan hal ini maka ekonomi syariah menekankan pada sosial bukan individual, karena pada dasarnya manusia hidup di dunia ini dengan tujuan bermanfaat bagi manusia dan saling menjaga tali silaturahmi.

g. Akhlaq (etika)

Akhlaq atau etika harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi Islam atau syariah, etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat dipelukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan salah satu jenis ibadah di bidang muamallah. Maka dari itu setiap kegiatan ekonomi Islam atau syariah harus dilandasi dengan etika-etika atau norma yang baik tentunya sesuai dengan ajaran Islam, hal inilah yang menjadi perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional.

h. Ulil Amri (pemimpin)

Berbicara tentang ulul amri atau pemerintah pasti juga ada hubungannya dengan perekonomian, begitu juga pada ekonomi Islam. Dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, ekonomi Islam harus melibatkan pemerintah di dalamnya, selain itu ekonomi Islam harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama itu tidak menyeleweng dengan ajaran atau nilai-nilai Islam yang ada. Karena bagaimanapun yang memiliki kuasa

atau hak lebih untuk mengatur jalannya perekonomian adalah pemerintah, baik buruknya perkembangan suatu negara disebabkan oleh pemerintahannya. Jadi, bagaimanapun ekonomi Islam harus selalu melibatkan pemerintah dalam perjalanan ekonominya.

i. Al-hurriyah dan Al-Mas'uliyah

Al hurriyah berarti kebebasan dan al mas'uliyah diartikan sebagai tanggung jawab. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan karena adanya kebebasan harus ada pertanggungjawaban yang baik. Al hurriyah atau kebebasan diartikan bahwa manusia bisa bebas menentukan pilihannya baik itu hal yang baik dan hal yang buruk. Hal ini ditentukan dengan akal yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan dalam perspektif ushul fiqh kebebasan diartikan sebagai suatu kebebasan yang harus dibarengi dengan suatu pertanggungjawaban. Sedangkan untuk tanggung jawab itu tidak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak. Inilah prinsip ekonomi syariah, manusia diberi kebebasan namun ada batasannya yaitu harus dipertanggungjawabkan. Apapun yang terjadi dan sudah dilakukan harus mampu dipertanggungjawabkan.

j. Berjamaah (kerjasama)

Dalam ekonomi Islam, kerjasama merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan seperti layaknya sholat yang dilakukan secara berjamaah bisa mendapatkan pahala lebih yaitu 27 derajat. Begitu juga dalam perekonomian ketika apapun dilakukan secara berjamaah maka nilai ibadah maupun nilai dalam hal harta akan semakin bertambah. Jadi dalam ekonomi Islam semua kegiatan dan aktivitas dilakukan secara berjamaah dengan niatan yang baik agar bisa menghasilkan output yang baik pula.³⁶

³⁶ <https://www.google.com/amp/s/dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penjelarasannya/amp>, diakses pada tanggal 18 November 2018, pukul 10.23 WIB.

E. Manajemen Likuiditas dalam Perspektif Ekonomi Islam

Manajemen likuiditas di bank syariah atau Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari asset dan *liability management* yang secara umum bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah agar kegiatan operasional tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga. Ruang lingkup dalam pengelolaan likuiditas adalah mengoptimalkan penggunaan dana agar tidak terjadi *idle fund* yang besar dan tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas. Untuk itu estimasi kebutuhan dana likuiditas yang diperoleh melalui proyeksi arus kas menjadi sangat penting.³⁷

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad ekonomi dalam Islam.

Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam antara lain Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dan Sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen, produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit sistem ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain: kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*).³⁸

³⁷ Nurul Ichsan, *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*, Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka (Uhamka), Jakarta, 2013, hlm. 103.

³⁸ M. Yusuf Bahtiar, 2017, *Pengaruh Label Halal pada Produk dalam Kemasan dan Harga terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Produk Kecantikan di Supermarket Chandra dan Ramayana Kota Bandar Lampung)*.

1. Kesatuan (*unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.
2. Keseimbangan (*equilibrium*), dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
3. Kehendak Bebas (*Free Will*), kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak dan shodaqoh.
4. Tanggung jawab (*Responsibility*), untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.³⁹

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan, jasa

³⁹ <http://zonaekis.com/prinsip-prinsip-dasar-dalam-etika-bisnis-islam/>, diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 20:22 WIB

dan sebagainya yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.

Dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang Umat Islam mempergunakan cara-cara yang batil seperti dengan melakukan kegiatan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap dan cara batil lainnya.⁴⁰

Aktivitas ekonomi yang dibenarkan dalam syariah Islam adalah yang memenuhi beberapa hal, diantaranya: Pertama, bersifat produktif. Fokus dalam kegiatan ekonomi secara riil merupakan unsur paling utama dalam ekonomi Islam. Hal tersebut berarti ekonomi Islam memandang bahwa semua kegiatan ekonomi harus bersifat produktif. Hal inilah yang menjadi penyebab bunga yang merupakan pendapatan yang tidak produktif atau merupakan suatu imbalan atas modal, bukan dari penggunaan modal tidak diperbolehkan. Kedua, tidak eksploitatif yang berarti kegiatan ekonomi dijalankan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Hak kepemilikan adalah menurut asas kemanfaatan, bukan asas penguasaan. Ketiga, tidak diperbolehkan ada transaksi ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang sedang terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Keempat, bersifat spekulatif. Dalam aktivitas ekonomi, spekulasi dinilai sebagai sesuatu yang tidak memberikan manfaat atau mubazir. Spekulasi dinilai sebagai wujud perjudian dan mengakibatkan orang yang melakukannya dapat terancam miskin. Uang dan barang yang dispekulasikan pun akan menjadi tidak produktif atau tidak memberikan manfaat. Kelima, Anti riba. Islam melarang adanya tambahan yang ditetapkan dalam suatu perjanjian atas suatu barang yang dipinjam dan ketika barang tersebut dikembalikan.⁴¹

⁴⁰ M. Yusuf Bahtiar, 2017, *Pengaruh Label Halal pada Produk dalam Kemasan dan Harga terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Produk Kecantikan di Supermarket Chandra dan Ramayana Kota Bandar Lampung)*.

⁴¹ <https://portal-ilmu.com/prinsip-ekonomi-islam/>, diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 09.55 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM) KOTA TEGAL

A. Sejarah Pendirian BTM Kota Tegal

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KMKMS) Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal. Koperasi Simpan Pinjam (KSPS) BTM Kota Tegal adalah lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan amal usaha Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tegal dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Timur I Kota Tegal yang menjembatani antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan pengusaha atau pedagang kecil dan menengah untuk lebih berkembangnya perekonomian mereka.

Penggabungan dari BMT Royan milik Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tegal Timur I yang didirikan pada tahun 2008 dengan sebagian aset KJKS Bina Arta milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tegal yang didirikan pada tahun 2007.

Pada tanggal 23 November 2013 dilakukan rapat anggota khusus untuk dilakukan perubahan Anggaran Dasar KSU (BMT) Royan dan selanjutnya diajukan pengesahan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tegal.

Pada tanggal 8 Januari 2014 dilakukan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar KSU (BMT) Royan menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitut Tamwil Muhammadiyah Kota Tegal (KSPS BTM Kota Tegal) telah dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tegal dengan surat pengesahan No. 01/BH/PAD/XIV.33/I/2014.⁴²

⁴² Dokumen Buku Sejarah Pendirian KSPS BTM Kota Tegal

Selanjutnya penggabungan mulai efektif dilakukan pada 1 Februari 2014 dengan menempati Kantor di Jalan Werkudoro No. 94 Slerok yang merupakan sewa rumah milik Bapak Ir. H. Yuli Susantio selama 2 tahun.

Melalui surat No. 200/A/PSP.BTM/V tertanggal 17 Mei 2014 dari Pusat BTM Jawa Tengah, KSPS BTM Kota Tegal telah resmi menjadi anggota Koperasi Sekunder Pusat BTM Jawa Tengah.

Terbitnya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah didirikan pada Desember 2014 serta kebijakan Pusat BTM Jawa Tengah, menghendaki seluruh jaringan BTM di Jawa Tengah untuk menjadi LKM.

Untuk memenuhi UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Kebijakan Pusat BTM Jawa Tengah maka Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BTM Kota Tegal telah melakukan perubahan Anggaran Dasar kembali sehingga namanya telah berubah menjadi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (KLKMS) BTM Kota Tegal dengan SK PAD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tegal No. 031/PAD/XIV.33/XI/2015 tertanggal 17 November 2015, serta pengesahan dari Walikota Tegal dengan SK No: 518/126/2015 tertanggal 30 November 2015.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat di Jakarta tertanggal 28 Januari 2016 dengan SK No: Kep/10/NB.123/2016 dan diterima pada tanggal 16 Februari 2016, telah mengeluarkan izin usaha “Bersyarat” bagi KLKMS BTM Kota Tegal.⁴³

Terhitung sejak tanggal 28 Maret 2016 Kantor KLKMS BTM Kota Tegal pindah di Jalan Arjuna No.114 Kelurahan Slerok menyewa pada Lt.1 Gedung Dakwah PCM Tegal Timur I. Melalui keputusan Dewan Komisiner OJK No: Kep-7/KO/0303/2018 tertanggal 31 Januari 2018 telah menggantikan SK sebelumnya No. Kep-45/KO.0303/2017 tanggal 28 Desember 2017 dan SK No: Kep-10/NB.123/2016 tanggal 28 Januari

⁴³ Dokumen Buku Sejarah Pendirian KSPS BTM Kota Tegal

2016, tentang Pemberian Izin Usaha kepada KSKMS BTM Kota Tegal dengan cakupan wilayah usaha Kota Tegal.⁴⁴

B. PENGENDALIAN RISIKO

KSKS BTM Kota Tegal selalu berupaya untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan anggota dan masyarakat dengan tetap memelihara tingkat kesehatan usahanya. Kesempatan untuk bermuamalah melalui fasilitas pembiayaan pada prinsipnya diberikan secara adil dan merata kepada setiap calon mitra yang memenuhi kualifikasi, sehingga dengan demikian akan terjadi penyebaran risiko sedemikian rupa dan terhindar dari pemusatan pembiayaan pada pihak-pihak tertentu.

1. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)

- a. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada mitra baik dalam bentuk penyediaan dana dan atau barang yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak koperasi dengan mitra selalu diperhitungkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).
- b. Cara perhitungan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan. Perhitungan BMPP didasarkan atas jumlah yang terbesar dari penjumlahan penyediaan dana atau baki debit penyediaan dana.
- c. Penetapan perhitungan jumlah modal koperasi untuk memperhitungkan BMPP dilakukan setiap bulan.
- d. Besarnya BMPP ditentukan oleh kebijakan KSKS BTM Kota Tegal.⁴⁵

2. Pembiayaan yang dihindari

KSKS BTM Kota Tegal dalam upaya melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tingkat kesehatan usahanya menetapkan *negative list* yang akan ditinjau secara periodik pembiayaan-pembiayaan yang dihindari, yaitu:

⁴⁴ Dokumen Buku Sejarah Pendirian KSKS BTM Kota Tegal

⁴⁵ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSKS BTM Kota Tegal.

- a. Pembiayaan yang tidak sesuai syariah, yaitu pembiayaan yang penggunaannya untuk usaha-usaha dan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang bertentangan dengan syariah Islamiyah.
- b. Pembiayaan untuk spekulasi, pembiayaan yang bersifat spekulasi harus dihindari karena tidak mencerminkan kesungguhan dalam berusaha dan mengandung unsur gharar dan maysir.
- c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan, pemberian pembiayaan tanpa informasi keuangan yang memadai (transparan dan obyektif) akan membahayakan mitra dan koperasi.
- d. Pembiayaan pada bidang yang tidak dikuasai, pengajuan pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak tercantum dan atau tidak dikuasai, pengajuan pembiayaan untuk bidang usaha yang tidak tercantum dan atau tidak dikuasai oleh pejabat KSPS harus ditolak secara dini.
- e. Pembiayaan kepada mitra bermasalah. Pejabat KSPS yang berkompentensi dengan pembiayaan hendaknya selalu melakukan checking tentang mitra yang akan dibiayai, bila tergolong bermasalah harus ditolak pembiayaannya.
- f. Pembiayaan kepada mitra (pedagang) yang akan menjual kembali barang yang dibiayai oleh koperasi kepada konsumennya secara kredit (angsuran).⁴⁶

C. ORGANISASI DAN MANAJEMEN

1. Perangkat Organisasi dan Manajemen Pembiayaan

Untuk mendukung pemberian pembiayaan yang sehat maka KSPS BTM Kota Tegal untuk menyediakan struktur pengendalian manajemen pembiayaan mulai tahap awal proses kegiatan pembiayaan sampai pada tahap pengawasan dan pembinaan dengan membentuk:

- a. Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dan
- b. Komite Pembiayaan

⁴⁶ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

2. Komite Kebijakan Pembiayaan

a. Keanggotaan

- 1) Komite kebijakan pembiayaan KSPS diketuai oleh manajer KSPS dengan anggota terdiri dari Kepala Bagian Marketing, Kepala Bagian Operasional, dan Bagian Hukum atau Legal (jika telah ada).
- 2) Bila Manajer KSPS tidak dapat mengetuai Komite Kebijakan Pembiayaan, maka sebagai penggantinya ditunjuk salah seorang anggota lainnya dengan persetujuan pengurus.
- 3) Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan KSPS dan setiap perubahannya harus disertai dengan penjelasan tugas dan wewenang yang ditetapkan secara tertulis berdasarkan keputusan Manajer KSPS.
- 4) Apabila perlu, untuk memaksimalkan tugas-tugasnya, Komite Kebijakan Pembiayaan dibantu oleh suatu tim kecil yang diberi nama Tim teknis Komite kebijakan pembiayaan yang disahkan Manajer KSPS.⁴⁷

b. Fungsi Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan mempunyai fungsi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan pembiayaan terutama yang berkenaan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
- 2) Mengawasi agar KPP dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan (solusi) apabila terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPP.
- 3) Melakukan kajian berkala KPP jika diperlukan perubahan atau perbaikan terhadap KPP.
- 4) Memantau dan mengevaluasi mengenai:
 - a) Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

⁴⁷ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

- b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan pembiayaan.
 - c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dan mitra-mitra besar.
 - d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPP.
 - e) Ketaatan terhadap ketentuan undang-undang serta peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
- c. Komite atau Panitia Pembiayaan
- Komite atau Panitia Pembiayaan adalah para pejabat KSPS yang ditunjuk untuk membantu Manajer KSPS dalam menilai dan memberikan pertimbangan-pertimbangan suatu keputusan usulan pembiayaan calon mitra pembiayaan yang diajukan oleh *Account Officer*.⁴⁸
- d. Keanggotaan Komite Pembiayaan terdiri dari:
- 1) Manajer KSPS.
 - 2) Kepala Bagian Marketing.
 - 3) Kepala Bagian Operasional selaku penanggung jawab ALCO.
 - 4) *Account officer* yang ditunjuk oleh Manajer KSPS.
- e. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan
- 1) Memberikan persetujuan atau penolakan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang dan atau jenis pembiayaan yang ditetapkan oleh Manajer KSPS berdasarkan keahliannya secara cermat, jujur dan obyektif.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee (ALCO)* dalam aspek pendanaan pembiayaan.
 - 3) Menolak permintaan dan atau pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan untuk memberikan persetujuan pembiayaan yang bertentangan dengan kebijakan pembiayaan.

⁴⁸ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

f. Wewenang dan Tanggung Jawab Organisasi dan Manajemen Pembiayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen pembiayaan, ketua dan anggota komite pembiayaan harus menjalankan kewajibannya sesuai hirarki organisasi dan selalu menjaga amanah.⁴⁹

1) Manajer KSPS

- a) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembiayaan yang akan dituangkan dalam rencana kerja KSPS serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.
- b) Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan KPP yang memuat semua aspek yang tercantum dan yang sekurang-kurangnya mencantumkan masukan yang disampaikan Komite Kebijakan Pembiayaan.
- c) Memastikan bahwa KPP telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
- d) Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan Komite Kebijakan Pembiayaan.
- e) Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam pembiayaan yang ditemui oleh Internal Audit.
- f) Memastikan ketaatan KSPS terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pembiayaan.
- g) Menetapkan anggota-anggota Komite Kebijakan Pembiayaan dan Komite Pembiayaan.
- h) Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Pengurus disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan ditakutkan sekurang-kurangnya mengenai:

⁴⁹ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

- (1) Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - (2) Perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Koperasi dan mitra tertentu.
 - (3) Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan pembiayaan bermasalah.
 - (4) Penyimpangan dan atau pelaksanaan KPP.
 - (5) Temuan-temuan penting dalam pembiayaan yang dilaporkan oleh Internal Audit.
 - (6) Pelaksanaan dan rencana pembiayaan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana kerja Koperasi.
 - (7) Penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang pembiayaan.
- 2) Satuan Kerja Pembiayaan
- a) Cakupan tugas dan kewenangan satuan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan Keputusan Manajer KSPS secara tertulis.
 - b) Satuan Kerja Pembiayaan wajib:
 - (1) Mentaati semua ketentuan yang ditetapkan dalam KPP.
 - (2) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
 - (3) Menghindari diri dari pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan yang dapat merugikan Koperasi.⁵⁰

⁵⁰ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

D. KEBIJAKAN DAN KETENTUAN PENYALURAN DANA

1. Ketentuan Umum

Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Pembiayaan KJKS atau Koperasi harus diutamakan kepada anggotanya. Kegiatan ini merupakan sumber utama pendapatan KJKS dan UJKS Koperasi untuk menutupi seluruh pengeluarannya.

Pembiayaan kepada calon anggota, Koperasi lain dan anggotanya jika dan hanya jika KSPS BTM Kota Tegal memiliki kapasitas lebih atas dasar pertimbangan skala ekonomi dan efisiensi setelah mengutamakan pelayanan kepada anggotanya dan mendapat persetujuan rapat anggota.⁵¹

Untuk mendorong partisipasi anggota dalam pembiayaan serta merangsang calon anggota agar menjadi anggota Koperasi, perlu dipertimbangkan untuk membedakan pemberlakuan tingkat keuntungan antara anggota dan calon anggota.

Pembiayaan harus didasarkan kepada prinsip kehati-hatian dan selalu mempertimbangkan bahwa:

- a. Pembiayaan akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan
- b. Diyakini bahwa pembiayaan dapat dibayar kembali oleh mitra pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Kebijakan mengenai jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh KJKS atau Koperasi yang memiliki UJKS kepada anggota harus memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pemanfaatan pembiayaan oleh calon mitra pembiayaan.
- 2) Kemampuan calon mitra pembiayaan untuk membayar kewajibannya.

⁵¹ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

- 3) Likuiditas koperasi dengan mempertimbangkan cadangan kas primer dan sekunder.
- 4) Distribusi risiko pembiayaan melalui asuransi pembiayaan atau lembaga penjamin.

Perjanjian pembiayaan harus tertulis dan mengatur berbagai hal yang telah disepakati. Apabila jumlah pembiayaan di atas plafon yang telah ditetapkan, disarankan untuk membuat akta perjanjian di depan notaris dan atas sepengetahuan rapat anggota.

Dalam hal KSPS BTM Kota Tegal masih memiliki kelebihan dana setelah anggota mendapat pelayanan sepenuhnya, maka pengelola KSPS BTM Kota Tegal dapat melayani calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang menganggur.⁵²

Tahapan penggunaan kelebihan dana pada KSPS BTM Kota Tegal:

- 1) Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pembiayaan sepenuhnya, maka pengelola KSPS BTM Kota Tegal dapat melayani calon anggota.
- 2) Apabila anggota dan calon anggota sudah mendapat pelayanan sepenuhnya, pengelola KSPS BTM Kota Tegal dapat melayani Koperasi lain dan anggotanya berdasarkan perjanjian kerjasama antar Koperasi yang bersangkutan.
- 3) Dalam hal terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, setelah melaksanakan kegiatan pemberian pembiayaan (butir 1 dan 2) atas persetujuan rapat anggota, pengelola KSPS BTM Kota Tegal dapat:
 - a) Menempatkan dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka, pada bank dan lembaga keuangan syariah lainnya.
 - b) Pembelian saham atau obligasi syariah melalui pasar modal.
 - c) Menempatkan dana pada sarana investasi syariah lainnya.

⁵² Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

Pemanfaatan kelebihan dana sebagaimana tercantum pada butir di atas memperhatikan hal berikut:

- 1) Dalam penempatan kelebihan dana untuk pembelian saham, obligasi dan sarana investasi lainnya, pengelola harus mendapat persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.
 - 2) Pembiayaan kepada anggota Koperasi lain harus diberikan melalui Koperasinya.
 - 3) Rapat anggota menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan baik kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
 - 4) Pembiayaan kepada calon anggota harus ada jaminan, dan pembiayaan kepada Koperasi lain dan atau anggotanya harus didukung dengan perjanjian antar Koperasi yang bersangkutan.
 - 5) Pemanfaatan kelebihan dana harus dapat meningkatkan hasil usaha KSPS BTM Kota Tegal.
2. Pelayanan Pembiayaan Kepada Unit Lain (Khusus Untuk UJKS Koperasi)

UJKS Koperasi yang memberikan pelayanan pembiayaan kepada unit lain dalam koperasinya harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti halnya pemberian pembiayaan pada mitra usaha anggota dan calon anggota. Pihak manajemen UJKS Koperasi harus menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada unit lain dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas UJKS Koperasi dan kelayakan ekonominya.⁵³

3. Pelayanan Pembiayaan Kepada Koperasi Lain dan atau Anggotanya

KSPS BTM Kota Tegal, wajib memiliki aturan tertulis yang mengatur mengenai prosedur pembiayaan kepada koperasi lain dan atau anggotanya. KSPS BTM Kota Tegal yang memberikan pelayanan pembiayaan kepada koperasi lain dan atau anggotanya harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti halnya pemberian

⁵³ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

pembiayaan pada anggota. Manajemen KSPS BTM Kota Tegal harus menetapkan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada koperasi lain dan atau anggotanya dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas KJKS atau UJKS Koperasi dan kelayakan ekonominya.

4. Plafon Pembiayaan

a. Penetapan Plafon Pembiayaan

KJKS atau UJKS Koperasi melalui rapat anggota harus menetapkan berapa besarnya nilai pembiayaan minimal dan berapa besarnya nilai pembiayaan maksimal yang dapat diberikan. Penentuan nilai pembiayaan minimal berkaitan dengan efektivitas penyaluran pembiayaan, sedangkan penentuan besarnya nilai pembiayaan maksimal berkaitan dengan penekanan risiko pembiayaan.⁵⁴

b. Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif

Penetapan batas minimal dan maksimal pembiayaan produktif harus mempertimbangkan hal berikut:

- 1) Tepat jumlah.
- 2) Tepat sasaran.
- 3) Tepat penggunaannya.
- 4) Tepat pengembalian.

Besarnya plafon pembiayaan produktif lebih didasarkan pada kelayakan usaha calon mitra.

c. Penetapan plafon Pembiayaan Konsumtif

Besarnya plafon pembiayaan konsumtif dapat ditetapkan sebesar 3 kali nilai simpanan dan atau cicilan pembiayaan per periode (bulan), tidak lebih dari 30% penghasilan calon mitra.

d. Penetapan Plafon Pembiayaan Produktif dengan agungan besarnya nilai maksimal pembiayaan produktif yang menggunakan agungan yang dapat ditetapkan adalah 75% dari nilai agungan.

⁵⁴ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

5. Biaya Pembiayaan

a. Strategi Penetapan Marjin Pembiayaan

Sebelum menetapkan strategi penetapan marjin pembiayaan, manajemen KSPS BTM Kota Tegal harus memperhatikan faktor-faktor berikut:

- 1) Biaya produk, dalam hal ini adalah bagi hasil kepada shahibul maal serta biaya operasional lainnya;
- 2) Mitra usaha (anggota atau calon anggota), pada pasar yang bersaing mitra usaha akan memilih harga (tingkat marjin) yang lebih menguntungkan;
- 3) Pesaing, situasi persaingan apakah mendekati pada struktur pasar persaingan sempurna atau mendekati pada pasar monopoli. Jika mendekati pasar persaingan sempurna biasanya tingkat marjin ditentukan oleh tingkat marjin pasar, tetapi jika mendekati pasar monopoli maka KSPS BTM Kota Tegal dapat menetapkan marjin lebih fleksibel;
- 4) Mutu pelayanan;
- 5) Permintaan dan penawaran dana;
- 6) Laba yang diinginkan;
- 7) Tingkat risiko pembiayaan yang dikaitkan dengan jenis usaha mitra usaha, jangka waktu pembiayaan, besarnya pembiayaan dan faktor-faktor ketidakpastian lainnya.⁵⁵

Setelah memperhatikan faktor-faktor di atas, kebijakan penetapan marjin pembiayaan melalui tahapan berikut:

- (a) Tahap pertama, KSPS BTM Kota Tegal harus melakukan rasionalisasi dari segala kegiatannya agar dapat beroperasi secara efisien.
- (b) Tahap kedua, KJKS atau UJKS Koperasi dapat menghitung keuntungan bagi anggotanya yang pada akhirnya akan

⁵⁵ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

mendorong terciptanya produk-produk baru atau peningkatan mutu pelayanan kepada anggotanya.

(c) Tahap ketiga, dengan peningkatan mutu pelayanan dan peningkatan keuntungan bagi anggota, akan meningkatkan daya saing KSPS BTM Kota Tegal.

(d) Tahap keempat, penetapan margin pembiayaan merupakan suatu proses yang dinamis yang setiap saat perlu ditinjau kembali.

E. PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN

1. Kewajiban Pemantauan dan Pembinaan

a. *Account Officer* berkewajiban menjaga agar pembiayaan koperasi kepada mitra harus dapat dilunasi pada waktunya dengan baik. Oleh karenanya *Account Officer* harus melakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala kepada mitra yang bersangkutan.⁵⁶

b. Pemantauan dan pembinaan adalah suatu cara yang konstruktif agar:

- 1) Kondisi usaha mitra menjadi lebih baik
- 2) Mengarahkan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan benar (tepat guna)
- 3) Tindakan preventif agar tidak terjadi wanprestasi
- 4) Terbina hubungan silaturahmi yang sehat dan menumbuhkan komitmen mitra dengan koperasi, sehingga apabila terjadi masalah terhadap usaha mitra, *Account Officer* akan lebih mudah mengatasinya.

c. Metode Pemantauan dan Pembinaan dilakukan dengan cara:

- 1) Sekuramg-kurangnya melalui hubungan telepon.
- 2) Kunjungan silaturahmi ke tempat mitra (rumah dan atau tempat usaha).
- 3) Mengevaluasi mutasi rekening dan atau keuangan mitra.

⁵⁶ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

- 4) Memperhatikan kelangsungan usaha mitra.
 - 5) Membantu mitra untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan problem *cash flow*.
- d. Dalam pemantauan dan pembinaan koperasi hendaknya melakukan:
- 1) Menghindari sikap yang semata-mata mencari kesalahan atau kelemahan mitra.
 - 2) Apabila ditemukan adanya kesalahan diperlukan evaluasi secara kritis dan analitis serta apakah ada kemungkinan mitra memperbaikinya.
- e. Pelaporan (kondisi kunjungan)
- 1) *Account Officer* yang melakukan pemantauan dan pembinaan harus membuat laporan yang diperoleh termasuk hasil kunjungan lapangan yang bersifat teknis dan non-teknis.
 - 2) Laporan disampaikan kepada Manajer KSPS melalui Kepala Bagian Marketing untuk dikritisi dan menentukan langkah-langkah antisipasi dan penanganannya.⁵⁷
2. Pelunasan dan Pelepasan Jaminan
- a. Pelunasan adalah selesainya kewajiban mitra terhadap koperasi. Pelunasan tersebut akan berdampak kepada dokumen-dokumen penting yang diserahkan mitra kepada koperasi, karena itu mitra berhak meminta kembali dan koperasi berkewajiban mengembalikannya.
 - b. Pelepasan Jaminan
Jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan keadministrasian serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan koperasi.

⁵⁷ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

- c. Untuk menghindari risiko yang tidak perlu, koperasi tidak menyimpan dokumen jaminan yang diserahkan mitra yang sudah melunasi kewajibannya.⁵⁸

⁵⁸ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.

BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN LIKUIDITAS DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PADA BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH (BTM)
KOTA TEGAL

A. Manajemen Likuiditas BTM dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam suatu lembaga keuangan sering dikenal dengan adanya manajemen likuiditas. Pentingnya penilaian atas manajemen likuiditas suatu lembaga merupakan salah satu cara untuk menentukan apakah lembaga tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Apabila di dalam kegiatan operasionalnya lembaga mampu menjalankan likuiditas dengan baik, maka akan memberikan dampak positif berupa kepuasan bagi anggota itu sendiri. Namun sebaliknya, apabila lembaga tidak mampu memenuhi likuiditasnya dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan lembaga dan menimbulkan ketidakpercayaan anggota terhadap pelayanan yang diberikan BTM. Oleh karena itu, BTM Kota Tegal dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan likuiditas demi menjaga kondisi lembaga keuangan agar dapat terus berkembang sebagaimana mestinya.

Menjaga likuiditas merupakan kewajiban bagi setiap lembaga keuangan. Kondisi likuid yang buruk seringkali menyebabkan lembaga keuangan menjadi kolaps dan tutup. Setelah diamati, banyak fenomena tersebut diakibatkan oleh adanya ketidakmampuan lembaga untuk mengatur manajemen likuiditas. Banyak ketidakmampuan yang ditunjukkan, diantaranya: sirkulasi pemutaran uang (pembiayaan) yang tidak stabil, tidak adanya mitra kerjasama pada saat diperlukan penarikan dana dalam jumlah besar dan kurangnya SDM pengelola.

Manajemen likuiditas merupakan aspek penting untuk menjaga likuiditas. Sumber dana umumnya bersifat jangka pendek sedangkan pembiayaan bersifat jangka panjang. Berdasarkan data penelitian yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan Ibu Erlinawati, BTM Kota

Tegal menggunakan sumber dana (Kas) dan pembiayaan untuk mengatur likuiditas sehingga kebutuhan penarikan maupun pembiayaan dapat tercukupi.⁵⁹

Dalam manajemen aset yang penulis paparkan pada Bab II, kebutuhan likuiditas secara umum dipenuhi melalui cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan primer yang terdapat pada BTM Kota Tegal secara umum berupa kas (tabungan dan deposito) untuk memenuhi kebutuhan cadangan wajib dan untuk kebutuhan operasional. Cadangan primer tersebut digunakan oleh BTM Kota Tegal sebagai garis pertahanan pertama guna memenuhi permintaan kas sehari-hari. Sedangkan cadangan kas sekunder BTM Kota Tegal secara umum berupa aset yang dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat dengan risiko kehilangan nilai yang kecil. Adapun bentuknya yaitu berupa sekuritas berjangka pendek berupa sertifikat deposito.

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal secara umum telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan status rasio likuiditas, memperkecil dana yang menganggur guna meningkatkan pendapatan dengan risiko sekecil mungkin, serta memenuhi kebutuhan arus kas (*cash flow*) dan mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi *cash flow* dalam kondisi yang sangat mendesak seperti penarikan dana dalam jumlah besar. Terkait dengan adanya penarikan dalam jumlah besar, BTM Kota Tegal telah membuat *schedule* atau pemetaan yaitu pada saat masuk tahun ajaran baru sekolah dan bulan Ramadhan. Pada saat terjadi penarikan besar tersebut BTM Kota Tegal melibatkan BTM Pusat Jawa Tengah untuk mengajukan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan penarikan tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut, penulis melihat ada ketergantungan BTM Kota Tegal terhadap BTM Pusat Jawa Tengah. Hal ini menurut penulis kurang baik bagi keberlangsungan BTM. Dikhawatirkan pada

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Erlinawati, S.Ag. pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 09:17-09:45, di BTM Kota Tegal.

waktu-waktu tertentu jika BTM Pusat Jawa Tengah tidak mampu memenuhi permintaan BTM Kota Tegal maka akan merugikan anggota yang akan melakukan penarikan. Dalam pandangan ekonomi Islam, aktivitas keuangan yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dibenarkan dalam Islam.

Ketidakkampuan dalam memenuhi suatu permintaan penarikan maupun pembiayaan secara umum berpengaruh langsung terhadap kepercayaan anggota. Bahkan kondisi tersebut dapat menyebabkan hilangnya anggota untuk menyimpan uangnya. Lembaga harus mampu mengantisipasi risiko likuiditas dengan cara mempertahankan tingkat likuiditas tertentu yang mencukupi atau harus mampu menyediakan dana dalam rangka untuk mendapatkan likuiditas yang memadai.

Pada saat penulis melakukan wawancara dengan Manajer BTM Kota Tegal, Pak Agung menyebutkan bahwa manajemen likuiditas yang diterapkan pada BTM Kota Tegal berupa *cash ratio* dengan besaran 11%-15% dari pihak ketiga. Untuk mengatasi dan mengantisipasi terjadinya risiko likuiditas, BTM Kota Tegal melakukan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh anggota, baik berupa penarikan melalui kliring maupun penarikan tunai, sehingga dapat terdeteksi setiap harinya apakah *cash ratio* naik atau turun.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Ibu Nur Badriyah, penulis melihat ada dua model pendekatan Manajemen Likuiditas yang dilakukan BTM Kota Tegal untuk memenuhi likuiditas yaitu melalui pendekatan Likuiditas Aktiva (*Assets Liquidity*) dan pendekatan Likuiditas Pasiva (*Liability Liquidity*). Pendekatan Likuiditas Aktiva (*Assets Liquidity*) merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan kas. BTM memperoleh dana dari sumber kas tabungan, pembiayaan dari BTM Jawa Tengah serta sekuritas jangka pendek. Sekuritas akan digunakan sebagai alat likuid untuk dijual segera guna

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan, Amd, pada tanggal 5 November 2018, pukul 13:30-14:12, di BTM Kota Tegal.

memenuhi kebutuhan operasional. Bentuk-bentuk sekuritas lembaga tersebut umumnya berupa asset bergerak seperti sepeda motor, sertifikat tanah, BPKB, obligasi jangka pendek, bangunan yang semuanya sudah dihitung berdasarkan plafon yang diajukan dan besaran nominal pembiayaan.

Sedangkan Pendekatan Likuiditas Passiva (*Liability Liquidity*) merupakan sarana untuk memenuhi permintaan pembiayaan dan penarikan simpanan dari masyarakat dengan cara membeli kebutuhan dana. Berkaitan dengan model pendekatan tersebut, BTM Kota Tegal membeli kebutuhan dana melalui deposito untuk memenuhi permintaan pembiayaan dan penarikan simpanan masyarakat.⁶¹

Manajemen likuiditas pada BTM merupakan bagian dari asset dan *liability management* yang bertujuan untuk menjaga likuiditas suatu lembaga keuangan syariah agar operasional dapat berjalan dengan baik dan tingkat kepercayaan masyarakat juga tetap terjaga dengan baik. Selain itu BTM berupaya mengoptimalkan penggunaan dana agar tidak terjadi *idle fund* (dana menganggur) dengan jumlah yang besar dan tidak terjebak dalam kesulitan likuiditas. Oleh karena itu estimasi kebutuhan dana likuiditas yang diperoleh dari arus kas menjadi sangat penting.

Dalam aktifitas ekonomi seperti yang telah dipaparkan dalam kegiatan yang ada di BTM Kota Tegal tentu harus berlandaskan pada prinsip syariah. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam sangat penting dan dianjurkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur kegiatan yang ada di dalam BTM. Pada kegiatan likuiditas yang dijalankan di BTM harus disertakan perjanjian antar kedua belah pihak atas dasar yang telah ditentukan oleh aturan yang ada di dalam BTM tersebut. Sehingga setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Nur Badriyah, SE, pada tanggal 6 November 2018, pukul 08:25-08:57, di BTM Kota Tegal.

prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad ekonomi dalam Islam.

Apabila anggota mampu memenuhi kewajibannya maka manajemen yang ada akan berjalan dengan baik. Namun sebaliknya, apabila manajemen ini tidak berjalan dengan optimal maka akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan oleh lembaga bahkan dapat menyebabkan lembaga tersebut menjadi kolaps.

Berdasarkan data yang diperoleh pada bab sebelumnya yang membahas tentang etika bisnis dalam Islam memuat 4 sifat antara lain kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*). Pada BTM Kota Tegal telah menerapkan kegiatan bisnis sesuai dengan teori etika bisnis tersebut, yaitu:

1. Kesatuan (*unity*), menerapkan konsep tauhid. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan akan keesaan Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Dialah pemilik mutlak dan absolut atas semua yang diciptakannya. Oleh sebab itu, segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis hendaklah mengikuti aturan-aturan yang ada, jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah diberikan. Ketika anggota telah menyetujui ketentuan yang ada di dalam BTM, maka anggota tersebut harus mengikuti semua peraturan-peraturan yang ada di dalamnya sebagai bentuk kepercayaan anggota atas lembaga tersebut dalam menjalankan tugasnya.
2. Keseimbangan (*equilibrium*), dalam aktifitas ekonomi harus disertai dengan perbuatan yang adil. Sebagaimana yang telah diterapkan pada BTM sendiri, di dalam menjalankan kegiatannya BTM tidak memandang anggota atau masyarakat dari kalangan manapun. BTM sendiri akan membantu masyarakat yang ingin mendirikan suatu usahanya sesuai kemampuan lembaga.

3. Kehendak Bebas (*Free Will*), manusia mempunyai suatu potensi dalam menentukan pilihan-pilihan yang beragam, karena kebebasan manusia tidak dibatasi. Tetapi dalam kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia haruslah sejalan dengan prinsip dasar diciptakannya manusia yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat. Seperti yang diterapkan dalam BTM, pihak maupun anggota memiliki kebebasan dalam kegiatan bermuamalah, akan tetapi harus menyadari akan peran setiap individu di dalam menjalankan aktifitasnya.
4. Tanggung jawab (*Responsibility*), erat kaitannya dengan tanggung jawab manusia atas segala aktivitas yang dilakukan kepada Allah dan juga tanggung jawab kepada manusia sebagai masyarakat. Karena manusia tidak hidup sendiri, dia tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Allah tentunya di akhirat, dan tanggung jawab kepada manusia didapat di dunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya. Setiap anggota maupun pihak BTM memiliki tanggung jawab atas upaya yang dilakukan di dalam kegiatan usaha tersebut. Setiap perbuatan yang dilakukan sudah sepantasnya harus mampu dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku didalamnya.

Beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentu konsep ekonomi Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana yang termaktub di dalamnya, Islam mengajarkan perilaku manusia pada kegiatan ekonomi, salah satunya adalah berperilaku sebagai pemilik modal. Yang mana di dalamnya harus disertakan dengan sifat jujur, amanah, tanggung jawab, dan lain-lain. Dengan adanya sifat tersebut yang tumbuh pada diri seseorang, maka kewajiban akan haknya dapat terpenuhi dan sistem operasional akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, di dalam melakukan kegiatan ekonomi, Al-Qur'an melarang orang muslim

untuk melakukan kegiatan dengan cara yang batil seperti riba, *gharar*, penipuan. Salah satu prinsip syariah yaitu melarang adanya praktek riba sesuai dengan surah Al-Baqarah: 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَبُتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*⁶²

Di dalam kegiatan ekonomi, Islam mengajarkan manusia dalam berperilaku sebagai pemilik modal. Seperti yang ada di BTM ini, anggota yang memiliki dana lebih, ia berhak untuk memberikan pinjaman bagi masyarakat untuk kemaslahatan bersama dalam menjalankan usahanya. Yang mana telah dijelaskan dalam Q.S.Al-Baqarah: 245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Selain itu, dalam mengelola manajemen likuiditas pada lembaga keuangan tentu harus disertai dengan sifat baik yang tumbuh pada diri setiap individu, salah satunya adalah tanggung jawab, karena hal ini sangat

⁶² Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 279.

penting di dalam menjalankan sistem operasional. Dalam hadist telah disebutkan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari 'Abdullah bin Umar r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (H.R. Al-Bukhari nomor 2232)

Melihat fakta yang telah digambarkan oleh BTM Kota Tegal tentang pelaksanaan manajemen likuiditas maka penulis berpendapat bahwa manajemen likuiditas yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang memiliki beberapa landasan atau dasar hukum untuk menopang dan mengawasi kinerja di dalam BTM. Prinsip tersebut antara lain:

1. Tauhid

Prinsip tauhid sendiri mengajarkan manusia agar menjalankan sistem perekonomiannya dengan baik.

2. Maslahah dan falah

Dalam menjalankan kegiatan operasional BTM berupaya penuh dalam memberikan segala sesuatu yang membawa dan mendatangkan manfaat bagi semua orang. Dan BTM berupaya agar dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi yang lebih tinggi.

3. Khalifah

Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi diberi amanat oleh Allah untuk menjaga dan memakmurkan bumi. Seperti yang ada di BTM, sesama umat harus saling membantu dalam sistem perekonomian dan berusaha memakmurkan masyarakatnya.

4. *Al-amwal* (harta)

Harta yang ada di muka bumi ini hanya titipan dari Allah SWT, kita sebagai manusia harus dapat mengemban amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Seperti lembaga keuangan pada BTM, manusia dituntut untuk dapat mengelola harta dengan baik dan sesuai syariat Islam.

5. *'Adl* (keadilan)

Dalam sistem operasional, BTM berprinsip pada keadilan. BTM harus mampu melayani masyarakat tanpa memandang dari segi apapun.

6. *Ukhuwah* (persaudaraan)

Dalam kegiatan ekonomi ini, secara tidak langsung masyarakat yang menjadi anggota di BTM sudah menjalin *ukhuwah*, untuk mempererat tali persaudaraan.

7. Akhlaq (etika)

Prinsip ini harus ada didalam setiap lembaga keuangan khususnya BTM, dalam kegiatan ekonomi Islam harus dilandasi dengan etika atau norma baik sesuai syariat Islam.

8. *Ulil Amri* (pemimpin)

Dalam kegiatan ekonomi syariah melibatkan pihak-pihak di dalamnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi tersebut. Karena harus melibatkan pemerintah di dalamnya untuk mengatur jalannya sistem perekonomian yang ada.

9. *Al-hurriyah* dan *Al-Mas'uliyah*

Manusia bebas menentukan pilihannya, namun manusia juga harus memiliki tanggungjawab atas apa yang telah menjadi pilihannya itu.

10. Berjamaah (kerjasama)

Di dalam lembaga keuangan harus disertai dengan kerjasama. Tanpa adanya kerjasama yang kuat, maka lembaga tidak akan berdiri dan berkembang sesuai yang diharapkannya.

B. Kendala Likuiditas Pada Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal

Dalam perkembangan suatu lembaga keuangan tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga. Lembaga keuangan seperti BTM saat ini dalam perkembangannya banyak diminati masyarakat, namun banyak lembaga yang tidak dapat menggunakan sistem ini dengan baik. Manajemen yang buruk dapat mengalami pailit pada suatu lembaga dikarenakan terjadinya penarikan uang secara besar-besaran hingga akhirnya lembaga kewalahan dalam menangani hal tersebut.

Suatu kendala dalam likuiditas seringkali menjadi tanda awal bahwa suatu lembaga akan mengalami kesulitan yang sangat serius pada finansialnya. Kesulitan ini biasanya ditandai dengan turunnya simpanan masyarakat yang menyebabkan kekurangan alat likuid sehingga terpaksa harus melakukan pinjaman antar lembaga dan menjual aktiva. Kesulitan itu akan bertambah parah jika lembaga lain menolak memberikan bantuan atau pinjaman kepada lembaga yang bermasalah. Dalam hal ini, lembaga berusaha memperoleh pinjaman pada lembaga lain untuk menutupi kekurangan yang ada pada lembaga.

Pada manajemen likuiditas itu sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan yang optimal, tersedianya aktiva cair dan kas yang memadai, menyimpan cadangan dengan baik, serta mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana anggota serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan adanya strategi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BTM, salah satunya adalah dengan cara menjaga likuiditas.

Fungsi utama likuiditas adalah memberikan jaminan bahwa uang yang disimpan atau dipinjamkan kepada BTM dapat dibayarkan kembali oleh lembaga tersebut pada saat jatuh tempo. Agar manajemen likuiditas

dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh lembaga, maka lembaga harus dapat mengoptimalkan sirkulasi pendanaan yang diterapkan pada BTM. Dengan berjalannya sistem operasional dengan baik, maka lembaga akan dapat berkembang sesuai harapan.

Pada saat Penulis melakukan wawancara dengan manajer BTM Kota Tegal, Pak Agung menyebutkan bahwa kendala yang paling utama adalah ketika tahun ajaran baru dan pada saat bulan ramadhan menjelang Idul Fitri. Karena pada saat itu penarikan tabungan seperti tabungan pendidikan akan ditarik oleh anggota secara besar-besaran. Hal ini tentu membuat pihak BTM menjadi resah karena tersedianya dana cadangan yang ada di BTM sangat minim sekali. Oleh karena itu, BTM perlu menangani masalah ini dengan serius.

Ketika BTM mengalami hal tersebut, maka strategi atau upaya yang dilakukan oleh lembaga dalam melayani anggota agar tidak merasa kecewa atas apa yang terjadi, maka BTM Kota Tegal meminta bantuan kepada BTM Pusat Jawa Tengah. Sehingga kendala yang sedang dihadapi dapat teratasi dengan segera. Dan tingkat kepercayaan anggota masih tetap terjaga dengan baik.

Apabila di dalam sistem pengelolaan likuiditas terus terjadi penarikan uang dalam jumlah yang besar, serta dana cadangan yang tersedia sangat minim, maka pihak BTM akan melakukan evaluasi setiap harinya untuk mengatasi permasalahan maupun kendala yang dihadapi BTM. Sehingga kendala yang dihadapi tidak terulang lagi dikemudian hari. Penulis melihat, kendala yang dihadapi oleh BTM Kota Tegal adalah pada saat terjadinya penarikan dalam jumlah besar. BTM belum mandiri dan masih melibatkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan penyediaan dana. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak buruk jika lembaga yang biasa memberikan suplay dana kepada BTM Kota Tegal pada saat yang dibutuhkan tidak mampu membantu atau memenuhi permintaan. Implikasi dari kondisi tersebut tentu akan berdampak pada stabilitas keuangan BTM Kota Tegal.

Terkait kendala di atas, kendala lain yang pernah dialami BTM Kota Tegal yaitu pengambilan dana yang tidak terduga atau sewaktu-waktu dalam jumlah besar yang menyebabkan BTM mengalami kekurangan dana dalam mengembalikan dana tersebut, karena dana cadangan yang ada di BTM sangat minim sekali.

Oleh karena itu, pada saat BTM melakukan evaluasi harian didapatkan kesimpulan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, maka BTM melakukan strategi yaitu apabila ada salah seorang anggota ingin mengambil dananya dalam jumlah besar, maka anggota tersebut wajib menghubungi pihak BTM, agar BTM dapat mempersiapkan atau mencairkan dana yang ingin diambil dengan estimasi waktu satu hari.⁶³

Selain itu, BTM Kota Tegal juga mengalami kendala kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi BTM sendiri. Karena ketersediaan dana yang ada pada BTM jumlahnya tidak terlalu besar. Apabila BTM memiliki banyak akses sumber dana, maka risiko terjadinya kekurangan dana sangat kecil. Dengan adanya akses pendanaan sangat penting bagi perkembangan BTM itu sendiri, karena untuk menunjang ketersediaan dana yang dimiliki.

Pada saat terjadinya penarikan oleh masyarakat, BTM tidak dapat memperkirakan pengambilan jumlah dana yang akan diambil. Dan pada saat itu juga pembiayaan harus tetap jalan sesuai dengan aturan yang ada.

Pada tabel pembiayaan pada tahun 2014 hingga 2018 penulis menemukan pembiayaan di tahun 2014 dan 2015 yang menyebutkan bahwa pembiayaan lebih besar daripada tabungan maupun deposito. Hal ini tentu akan meresahkan khususnya bagi BTM itu sendiri. Namun, BTM mencari solusi lain agar kondisi likuiditas tetap terjaga dengan aman tanpa merugikan anggotanya.

⁶³ Wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan, Amd, pada tanggal 5 November 2018, pukul 13:30-14:12, di BTM Kota Tegal.

Pak Agung selaku manajer BTM Kota Tegal membenarkan bahwa pada tahun tersebut BTM dibantu oleh BTM Pusat Jawa Tengah. Hal ini tentu cukup membantu bagi BTM Kota Tegal sendiri, karena mampu menutupi kekurangan dana. Namun, jika pada saat itu BTM Kota Tegal tidak mendapat bantuan dari BTM Pusat Jawa Tengah, maka yang terjadi adalah tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun, dan jika terjadi terus menerus maka lembaga akan mengalami kebangkrutan.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan, Amd, pada tanggal 5 November 2018, pukul 13:30-14:12, di BTM Kota Tegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen likuiditas yang diterapkan pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Manajemen likuiditas merupakan faktor yang sangat penting di dalam lembaga keuangan, bahkan sangat menentukan bagi kemampuan suatu lembaga untuk bertahan dan berkembang dalam persaingan usaha yang semakin kompetitif. BTM Kota Tegal merupakan suatu lembaga keuangan yang bersifat mikro. Akan tetapi sama halnya dengan bank-bank syariah lainnya. Di dalam sistem operasionalnya lembaga keuangan khususnya BTM ini wajib menyediakan likuiditasnya dengan cukup dan mengelolanya dengan baik, karena apabila likuiditas terlalu kecil maka akan mengganggu operasional BTM, namun likuiditas juga tidak boleh terlalu besar karena apabila jumlah likuiditas terlalu besar maka akan menurunkan efisiensi BTM sehingga akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas. Apabila BTM Kota Tegal mempunyai kelebihan dana maka dana tersebut akan disimpan oleh BTM pusat Jawa Tengah untuk diambil kembali sewaktu-waktu ketika BTM Kota Tegal ini sedang membutuhkan dana tersebut.

Alat likuid yang digunakan BTM Kota Tegal untuk mempertahankan tingkat likuiditasnya antara lain: sumber dana yang diperoleh melalui cadangan primer dan cadangan sekunder. Pada cadangan primer berupa kas (tabungan dan deposito) untuk memenuhi kebutuhan cadangan wajib dan untuk kebutuhan operasional. Sedangkan cadangan sekunder berupa aset yang dapat dikonversi

menjadi kas dengan cepat dalam bentuk sekuritas jangka pendek berupa sertifikat deposito.

Nilai-nilai Islam sangat penting dan dianjurkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur kegiatan yang ada di dalam BTM. Pada kegiatan likuiditas yang dijalankan di BTM harus disertakan perjanjian antar kedua belah pihak atas dasar yang telah ditentukan oleh aturan yang ada di dalam BTM tersebut. Sehingga setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Dalam aktivitas ekonomi, Islam telah mengatur dan memberikan batasan yang tepat di dalam pengelolaan keuangan. Aktivitas ekonomi Islam yang diterapkan pada BTM terdapat lima aktivitas ekonomi yang harus dipenuhi, diantaranya: Pertama, semua kegiatan ekonomi harus bersifat produktif. Kedua, tidak eksploitatif yang menguntungkan satu pihak namun merugikan pihak lain. Ketiga, setiap transaksi ekonomi tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Keempat, kegiatan ekonomi tidak bersifat spekulatif. Kelima, semua kegiatan ekonomi harus bersih dari praktik riba.

Dalam BTM terdapat dua model pendekatan manajemen likuiditas yang digunakan, antara lain pendekatan Likuiditas Aktiva (*Assets Liquidity*) yang sumber dananya diperoleh dari kas tabungan, pembiayaan dari BTM Pusat Jawa Tengah serta sekuritas jangka pendek berupa aset bergerak seperti sepeda motor, sertifikat tanah, BPKB, obligasi jangka pendek dan bangunan. Sedangkan pendekatan Likuiditas Pasiva (*Liability Liquidity*) yaitu sarana untuk memenuhi permintaan pembiayaan dan penarikan simpanan dari masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Tegal dalam mengelola likuiditas.

Salah satu kendala yang pernah dialami oleh BTM Kota Tegal adalah ketika tahun ajaran baru dan pada saat bulan ramadhan menjelang Idul Fitri. Karena pada saat itu penarikan tabungan seperti

tabungan pendidikan akan ditarik oleh anggota secara besar-besaran. Yang membuat pihak BTM menjadi resah karena tersedianya dana cadangan yang ada di BTM sangat minim sekali. Kemudian, strategi yang dilakukan oleh BTM adalah dengan meminta bantuan kepada BTM Pusat Jawa Tengah untuk menutupi kekurangan dananya. Sehingga kendala yang sedang dihadapi dapat teratasi dengan segera.

Kendala lain yang pernah dialami BTM Kota Tegal adalah pengambilan dana yang tidak terduga atau sewaktu-waktu dalam jumlah besar yang menyebabkan BTM kekurangan dana. Lalu BTM melakukan strategi dengan cara memberikan estimasi waktu satu hari untuk anggota yang ingin mengambil dananya dalam jumlah yang besar. Karena BTM perlu mencarikan dana tersebut.

B. Saran

Upaya BTM Kota Tegal dalam mengelola manajemen likuiditasnya cukup berhasil, pasalnya pada laporan keuangan dari 2014 hingga 2018, pada tahun 2014 dan 2015 BTM ini mengalami permasalahan dalam keuangannya, namun pada tahun-tahun selanjutnya BTM Kota Tegal ini tidak mengalaminya lagi. Hal ini dimungkinkan karena manajemen likuiditas yang dikelola berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan BTM. Namun di sisi lain, BTM harus tetap dapat menstabilkan manajemen likuiditas dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman dalam menjalankan stabilitas likuiditas. Adapun saran dari penulis untuk BTM Kota Tegal, diantaranya:

1. BTM dapat mencapai likuiditasnya dengan mempertahankan semua aktivasinya dalam bentuk uang tunai dan dapat memelihara posisinya agar tetap likuid.
2. Untuk meminimalisir terjadinya pengambilan uang yang sewaktu-waktu dan dalam jumlah yang besar sebaiknya BTM menyediakan dana cadangan yang lebih besar dari sebelumnya, sehingga kepercayaan anggota akan BTM tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Aziz, M. Amin, *Pedoman Penilaian Kesehatan BTM Baitul Mal wat Tamwil*, Jakarta: Pinbuk Press, 2005.
- Bahtiar, M. Yusuf, 2016, “*Pengaruh Label Halal pada Produk dalam Kemasan dan Harga terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Produk Kecantikan di Supermarket Chandra dan Ramayana Kota Bandar Lampung)*”, IAIN Raden Intan, Lampung.
- Dani, Mouchammad Arif, 2015, “*Upaya Meningkatkan Likuiditas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Melalui Sistem Pengoperasian Jasa dan Sistem Penyampaian Jasa: Studi Kasus pada BTM UGT Sidogiri Cabang Pembantu Bulak Surabaya*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Dokumen Buku Sejarah Pendirian KSPS BTM Kota Tegal.
- Hendro, Tri, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Ichsan, Nurul, *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*, Universitas Prof. Dr. Hamka Jakarta, 2013.
- Irana, Elsa Gustia, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008*, Universitas Lampung, 2015.
- Karim, Bustanul, *Prinsip Pembangunan Ekonomi Umat (Upaya Menggali Petunjuk Al-Qur'an Dalam Mewujudkan Kesejahteraan)*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- L, Richard, *Manajemen Edisi 6 Terj. Edward Tanujaya dan Shirly Tiolina*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Linawati, 2011, “*Strategi Pengelolaan Likuiditas pada Lembaga Keuangan Syariah*”, Fakultas Syariah, STAIN Pekalongan.
- M, Ralon, *Kamus Istilah Ekonomi Populer: Niaga Swadaya*, 2006.
- Purwaningsih, Dewi, 2008, *Analisis likuiditas dan rentabilitas untuk menilai kinerja perusahaan*, STAIN Pekalongan.
- Puspopranoto, Sawaldjo, *Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan Konsep, Teori, dan Realita*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004.
- Rivai, Veithzal, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari teori ke Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Riyanto, Bambang, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, Yogyakarta: BPF, 1995.
- Sinungan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KSPS BTM Kota Tegal.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2018.
- Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik & Aplikasi+Banking Risk Assesment*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006.
- Van Greuning, Hannie, *Analisis Risiko Perbankan, Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Wardiah, Mia Lasmi, *Dasar-dasar Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Website:

<http://hendyherijanto.blogspot.com/2013/09/prinsip-dan-unsur-pokok-ekonomi.html?m=1>, diakses pada tanggal 7 November 2018, pukul 09:55 WIB

<http://metrook.blogspot.com/2012/12/makalah-liquiditas-bank-syariah.html?m=1>, diakses pada tanggal 10 November 2018, pukul 22:25 WIB

<https://www.google.com/amp/s/dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/ekonomi-syariah/prinsip-ekonomi-syariah-dan-penjelasan/amp>, diakses pada tanggal 18 November 2018, pukul 10.23 WIB.

<http://zonaekis.com/prinsip-prinsip-dasar-dalam-etika-bisnis-islam/>, diakses pada tanggal 20 November 2018, pukul 20:22 WIB

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Agung Kurniawan selaku Pimpinan BTM Kota Tegal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Evi Vania Zuraida

Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 25 September 1996

Alamat Asal : Jl. KH. Mukhlas No. 11, rt.02 rw. 03
Kel. Panggung Kec. Tegal Timur.

Agama : Islam

No. Telepon : 085727534467

E-mail : evivania_zuraida@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Kota Tegal, 2000-2002.
2. SDN Panggung 5 Kota Tegal 2002-2008.
3. SMP Ihsaniyah Kota Tegal, 2008-2011.
4. SMA N 4 Kota Tegal, 2011-2014.
5. UIN Walisongo Semarang, 2014-sekarang.

Semarang, 10 Desember 2018

EVI VANIA ZURAIDA

NIM.1405026109